

DINAMIKA POLITIK LOKAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000. 000, 00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).
-

DR. MUHAMMAD UHAIB AS'AD, M.SI.

DINAMIKA POLITIK LOKAL

**Kekuasaan di Tengah
Pusaran Korupsi dan
Cengkeraman Oligarki**

Editor:
Sobirin Malian

totalmedia

DINAMIKA POLITIK LOKAL
Kekuasaan di Tengah Pusaran Korupsi dan
Cengkeraman Oligarki

Penulis:

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

Editor:

Sobirin Malian

Tata Letak & Rancang Sampul:

Bang Joedin

Cetakan Pertama, November 2020

ISBN 978-602-1271-67-4

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI No.065/DIY/09

Ilustrasi cover sumber internet

Kata Pengantar

PERAN apa yang dapat diberikan agar Indonesia lebih baik? Bagi seorang intelektual atau seorang akademisi jawabannya sangat jelas, yaitu berkontribusi dalam pemikiran. Oleh karena itu, seorang intelektual atau seorang akademisi harus memiliki mata yang tajam setajam elang, memiliki telinga sesensitif anjing liar dan selembut nurani para Nabi.

Dengan indra optimal demikian, diharapkan seorang intelektual atau akademisi tadi akan jernih melihat persoalan, akan obyektif menempatkan posisi di tengah dinamika masyarakat. Intinya, apapun persoalan kehidupan, dia akan mampu obyektif menilai lalu memberi solusi terbaik sebagai jalan keluarnya. Tentu sesuai dengan “core” disiplin ilmunya masing-masing.

Demikian pula dalam konteks mengkaji persoalan negara (politik) seperti tertuang dalam berbagai tulisan dalam buku ini, penulis berusaha menempatkan diri seobyektif mungkin, sehingga mampu menyelesaikan masalahnya juga dengan setepat mungkin.

Memang artikel atau tulisan-tulisan dalam buku ini, sebagian besar berisi “keprihatinan”. Oleh karena itu, analisis yang digunakan selalu dalam perspektif kritis, melihat substansi dan urgensi masalah dengan empati. Artinya, penulis memiliki harapan besar “jeratan demokrasi” masalah yang dihadapi pada saatnya nanti dapat diatasi dengan baik, sehingga rakyat tidak selalu menjadi korban atau obyek dari politik itu sendiri. Penulis masih ingin melihat atau paling tidak berandai-andai bahwa suatu saat nanti wajah politik kita benar-benar berwujud “demokrasi” yang elegan. Praktik politik tidak lagi diwarnai oleh saling sandera atau hanya untuk kepentingan pragmatis (elit, oligark, pembajak dan lain-lain) tanpa memperhatikan etika, hukum dan nurani.

Harapan ini tentu bukanlah cek kosong bila ditopang oleh negara hukum yang kokoh, aktor-aktor politik yang memiliki hati nurani yang bersih dan semangat *volgeist* (yaitu komitmen kuat, jujur, tegas dan berorientasi kemajuan pada bangsa dan negara).

Akhirnya, penilaian atas tulisan-tulisan dalam buku ini, kami kembalikan kepada para pembaca untuk menilainya. Semoga menjadi wawasan dan inspirasi ke arah Indonesia yang lebih baik.

Editor,
SM

Daftar Isi

Kata Pengantar ...| v

Daftar Isi ...| vii

1. Praktik Oligarki Menguat di Pilkada 2020 ...| 1
2. Di Balik Pilkada: Aktor Politik dan Perebutan Hegemoni Sumber Daya Lokal ...| 5
3. Arena Pilkada dan Permainan Para Cukong ...| 12
4. Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik ...| 16
5. Menggantang Asap Demokrasi ...| 24
6. Gurita Korupsi Politik dan Menjemput Ajal Anak Bangsa ...| 31
7. Persoalan Pertambangan di Sultra jadi Soroton Pemerhati Tambang Indonesia...|35
8. Jenderal Kunyuk dan Komparador ...| 39
9. Para Pengusaha Tambang di Balik Pilgub Kalimantan Selatan ...| 45

10. Munajat 212: Mobilisasi Dukungan terhadap Prabowo-Sandi ...| 49
11. Pengamat: Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung Oligarki ...| 51
12. Perselingkuhan Bisnis dan Politik: Suatu Peta Teoritik ...| 55
13. Respon Diskusi JaDi, Uhaib: Jangan Terlalu Menyanjung ...| 79
14. Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel ...| 81
15. KAMI Kalsel Dideklarasikan di Siring 0 Km ...| 88
16. Pakar Politik Kalsel Ingatkan Bahaya Pasar Gelap Demokrasi Jelang Pilkada ...| 92
17. Regional Elections Held Hostage By Capitalists: Political Observer ...| 94
18. Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri ...| 98
19. Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian...|104
20. Dr. Uhaib Digandeng 2 Profesor Luar Negeri Lakukan Penelitian ...| 108
21. Pilkada Pestanya para Pemilik Modal dan Oligarki ...| 110

22. Demokrasi Setan Masih Kuasai Pilkada Tanah Bumbu 2020 ...| 112
23. Politik Dinasti di Pilkada Merisaukan ...| 115
24. Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020 ...| 129
25. Dosen UNISKA Sampaikan Kekecewaan Rakyat Dihadapan Ketua DPRD Kalsel ...| 133
26. Pengamat Politik: Kepala Daerah Tidak Pro Rakyat, Jadi Kacung Pengusaha ...| 144
27. Pengamat: Biaya Pilkada Mahal, Kepala Daerah Akhirnya Jadi Kacung Oligarki ...| 148
28. Oligarki Mengancam HAM Warga Negara ...| 150
29. Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah Rawan Jadi Kacung Oligarki ...| 154
30. Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi Kekuasaan ...| 159
31. Praktik Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020 ...| 166
32. Ketika Daulat Demokrasi Runtuh ...| 170
33. Pilkada dan Pembusukan Politik ...| 178

1.

Praktik Oligarki Menguat di Pilkada 2020

PRAKTIK oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor bagi para kandidat.

Akibatnya, calon yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). “Proses politik yang dipengaruhi praktik oligarki akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elite (oligarki). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM masyarakat,” ungkap Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam webinar bertajuk Oligarki dalam Pilkada 2020, di Jakarta, kemarin.

Ketua tim pemantauan Pilkada 2020, Hairansyah mengatakan Komnas HAM menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah daerah seperti kasus konflik agraria, penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengabaian hak masyarakat adat, dan perburuhan.

Menurutnya proses pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, kepala daerah harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM.

Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis dalam diskusi itu, menjelaskan oligarki akan semakin subur pada pilkada kali ini. Pasalnya, pada masa pandemi covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu, aktivitas partai dikelola jauh dari prosedur demokratis yang terbuka. "Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih sebagai sekretaris daerah," tuturnya.

Menurut dia, ada sejumlah hal yang berkontribusi membuat oligarki semakin subur antara lain regulasi didesain untuk memudahkan masuknya oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, syarat calon perseorangan semakin berat dan mahal.

Biaya mahal

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Biaya-biaya itu antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan pemenangan. “Tidak mengherankan menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar.”

Selain itu, politik uang seperti vote buying (jual-beli suara), serangan fajar, termasuk mengebom satu wilayah dengan kekuatan uang juga kerap terjadi saat pilkada. “Intinya, modus praktik oligarki terjadi di hampir di semua proses politik,” tukasnya.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad, mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Kalimantan. “Pengusaha yang punya kepentingan atas sumber daya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal.”

Uang, tuturnya, sangat dominan dalam proses demokrasi. Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elite oligarki, mengembalikan uang tersebut dengan melanggengkan kepentingan para elite.

“Terjadi perselingkuhan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk KPK akibat proses transaksional saat pilkada dengan jaminan sumber daya alam,” tukasnya.[]

2.

Di Balik Pilkada: Aktor Politik dan Perebutan Hegemoni Sumber Daya Lokal

MEMAHAMI konstruksi dinamika politik lokal (*understanding the dynamic of local politics*) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sserentak 9 Desember 2020 datang, sesungguhnya bukan sebatas ritual demokrasi semata.

Akan tetapi jauh yang dapat kita dipahami melalui pendekatan analisa sosio-politik dan ekonomi politik adalah sebuah pertarungan antar aktor politik dan oligarki lokal. Mengapa demikian? Para aktor atau oligarki lokal memiliki struktur hegemoni dan mengintervensi desain perpolitikan lokal di Kalsel.

Struktur hegemoni itu dapat dilihat dari keberadaan partai politik (parpol) yang dikuasai oleh pemilik modal atau berlatar belakang sebagai penguasa tambang. Oleh karena itu memperdebatkan keberadaan partai politik di era demokratisasi menjadi perdebatan akademik yang selalu menarik.

Secara ideal, keberadaan partai politik seperti dikemukakan Robert Dahl, salah satu fungsinya adalah menjadi instrumen komunikasi politik dan membangun partisipasi politik warga. Namun faktanya, partai politik selama ini seperti ditulis oleh Bonifasius Hergens (2020) dalam *Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesian*, keberadaan partai politik sudah menjelma menjadi kartelisasi oligarki (*oligarchic cartelization*). Inilah realitas instrumen demokrasi yang tidak terhindari di era demokratisasi kapitalistik saat.

Tulisan Bonifasius Hergens ini memberikan konfirmasi teoritik dalam memahami realitas partai politik yang ada Kalsel. Suatu realitas di mana partai politik dikuasai oleh pemilik modal dan kartelistik. Lebih jauh lagi, selain partai politik bercorak kartelistik, juga menjadi instrumen penguatan politik famili, menumbuhkan suburkan praktek oligarki dan melestarikan feodalisme politik.

Struktur politik dan desain feodalisme politik semakin menjauhkan kualitas demokrasi dalam kontestas politik datang. Produk Pilkada serentak 2020 akan tetap melahirkan demokrasi paradoks yang akan menjawab kegelisahan rakyat di tengah realitas ekonomi dan politik yang semakin jauh dari cita-cita reformasi. Yaitu mimpi dan cita-cita bersama untuk sistem sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan bermartabat bagi anak negeri ini.

Pertanyaan krusialnya adalah: apakah Pilkada 9 Desember 2020 itu akan melahirkan pemimpin di masing-masing daerah bisa menjawab kegelisahan terstruktur itu?

Bila kita sedikit mau merenung, berkontemplasi, dan merekonstruksi imaginary order-order kita, bila realitas sistem politik, menguatnya kartelisasi partai politik, feodalisme politik, serta masifnya perilaku pemburu rente para elite politik dan penguasa saat, Pilkada justru hanya melahirkan penguasa baru yang melanggengkan demokrasi oligarki dan persekongkolan jahat antara penguasa dan modal.

Inilah lingkaran setan demokrasi bila proses proses demokrasi dibangun atas dasar kuasa uang ketimbang membangun demokrasi atas dasar kekuatan moralitas politik (*political morality*).

Pilkada sejatinya menghadirkan pemimpin yang memiliki kemampuan menterjemahkan dan memahami kegelisahan rakyat ditengah kesulitan ekonomi dan susahny mencari lapangan kerja bagi rakyat.

Ini adalah janji suci para penguasa daerah yang berlaga dalam Pilkada. Pilkada jangan sampai menjadi melahirkan penguasa demagog, monster, perampok, predator. Yaitu penguasa yang menyalahkan kekuasaan (*abuse of power*) dan mengabdikan kepada pemilik modal atau deviden politik.

Sejumlah riset saya lakukan bebera tahun ini terkait ini terkait dinamik politik lokal, relasi bisnis dan politik, korupsi pengelolaan sumber daya tambang, tambang dan pilkada, politik famili, memperlihatkan korelasi signifikan adanya struktur jaringan kuat terbangun antara politisi dan pebisnis.

Kuatnya relasi antara politisi dan pebisnis ini telah berdampak pada spekturum ekonomi dan politik. Politisi (penguasa daerah) dan penisnis (pemilik) saling menyendera, saling mempertukan kekuasaan (*trading influence*) untuk menguasai sumber daya ekonomi lokal dan politik.

Pilkada di Kalimantan Selatan, juga dapat dimaknai lebih dalam sebagai arena peternakan politik dan kekuasaan (*political farming and power farming*). Suka

atau tidak suka, inilah empirical evidence yang kita pahami political landscap di Kalimantan Selatan.

Argumentasi Henrik Enroth, 2017, dalam *Cartelization versus Representation*. Henrik membangun argumen, selama aktor politik dan partai politik tidak memahami fungsinya sebagai entitis yang memilik fungsi dan peran strategi membangun demokrasi, demokrasi akan terperangkap ke dalam catel dan oligarki.

Konstataasi teoritik ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya proses demokrasi, lingkungan politik, perilaku aktor dan partai politik sangat menentukan warna demokrasi, yaitu demokrasi berkualitas dan bermartabat.

Pemahaman kita selama ini, ada kesan bahwa proses demokrasi atau dari Pilkada ke Pilkada tidak lebih sekedar formalitas yang diwarnai hiruk-pikuk dan sejauh dari nilai kualitas dan substansi.

Partisipasi politik warga sekedar dimaknai dalam pemaknaan sempit. Yaitu warga datang berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedatangan warga ke TPS bisa saja tanpa adanya pemaknaan yang jelas kenapa harus ke TPS untuk bersedekah suara. Kehadiran warga ke TPS bisa saja karena karena dorongan atau faktor ideologis atau fragmatisme ekonomi.

Seperti yang tulisan Burhanuddin Muhtadi, 2020, dan Puadi, 2020, dan sejumlah penulisan lainnya menjelaskan bahwa proses demokrasi (Pilkada) masih dominan permainan politik uang (*money politics*), jual beli suara (*vote buying*).

Pertanyaannya adalah; apakah warga yang datang ke TPS itu pemilih ideologis atau pragmatis? Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa Kalimantan Selatan dalam beberapa Pilkada masih terpapar politik uang. Oleh karena itu tidak aneh bila para calon kepala daerah yang bertarung pada Pilkada pada Desember datang adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengusaha tambang atau calon kepala daerah yang memiliki jaringan dengan pengusaha tambang.

Untuk kasus fenomenal, sebagai laboratorium memahami demokrasi politik lokal mengenai relasi bisnis dan politik, Pilkada Tanah Bumbu lebih menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Diakui atau tidak bahwa di balik Pilkada Tanah Bumbu adalah sesungguhnya pertarungan antar aktor bisnis.

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanah Bumbu jauh lebih menarik diamati, diteliti secara akademik dalam perspektif ekonomi politik dan pola relasi antar aktor. Inilah pertarungan yang sesungguhnya di Octagon Pilkada.

Pilkada Tanah Bumbu bukan sekadar mementaskan proses demokrasi, tapi lebih dan lebih dalam dari itu semua adalah pertarungan para aktor bisnis. Arena arena adu gengsi para bos lokal. Arena mempertaruhkan hegemoni penguasaan wilayah sumber daya ekonomi dan politik.

Karenanya, pada akhirnya apa yang diteorikan oleh Professor Mancure Olson yang terkenal dengan teorinya roving bandit dan stationary bandit, yaitu teori menjelaskan para aktor yang membangun hegemoni penguasaan sumber daya ekonomi dalam suatu wilayah. Dengan demikian, Pilkada menjadi arena legal yang bisa digunakan oleh aktor bisnis dan menseponsori Pilkada. Pada akhirnya, terbangun patron-klien atau patronase bisnis dan politik.[]

3.

Arena Pilkada dan Permainan Para Cukong

STUDI mengenai relasi bisnis dan politik di negeri ini selalu menjadi perhatian dan kajian menarik di kalangan ilmuwan sosial seiring perkembangan dinamika ekonomi dan politik.

Sejumlah karya akademik atau penelitian telah memperlihatkan bahwa pada setiap fase kekuasaan, keterlibatan kelompok bisnis tidak terpisahkan dan berusaha mereposisi diri masuk ke dalam jaringan kekuasaan.

Hal ini seperti ditulis oleh Yahya Muhaimin (1990), dalam buku *Politik dan Bisnis*. Secara umum buku Yahya Muhaimin ini memberikan konfirmasi bahwa keterlibatan kelompok bisnis dalam kekuasaan sudah terjadi di era pemerintahan Orde Lama.

Namun demikian, kekuatan kelompok pengusaha pribumi masih memiliki posisi penyeimbang atau setidaknya masih mendominasi beberapa sektor-sektor bisnis lainnya.

Artinya, persaingan kelompok bisnis pribumi dan kelompok bisnis Cina walau sama-sama dalam proteksi dan regulasi negara, kelompok bisnis pribumi masih bisa beruntung tidak terkecil dalam kekuasaan atau oligarki bisnis Cina.

Hal yang membedakan ketika Orde Baru berkuasa, secara pelan-pelan kekuatan kelompok bisnis pribumi mengalami marjinalisasi dan penguasa Orde Baru lebih memilih bermain mata dengan penguasa Cina dan menempatkannya sebagai klien bisnis (*client-business*) istimewa dan mengendalikan oligarki bisnis secara total.

Selain karena kedekatan kelompok bisnis Cina ini dalam perlindungan atau regulasi penguasa Orde Baru, kelompok bisnis ini juga dibawa perlindungan tentara dan dikalangan tentara pun ikut berbisnis dan menguasai pos-pos sumber daya ekonomi dan bahkan politik selama Orde Baru berkuasa.

Tulisan ini mendeskripsikan bahwa keterlibatan kelompok bisnis dalam kekuasaan dari era kekuasaan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Demokrasi ini tidak dapat dihindari.

Persekongkolan para cukong dalam kekuasaan politik semakin terstruktur di era demokratisasi saat ini. Di era pasar demokrasi berbiaya tinggi telah membuka kesempatan (*window opportunity*) bagi para pemilik untuk berinvestasi dalam kontestasi demokrasi. Investasi politik ini sangat mudah dipahami bahwa perilaku itu salah satu bentuk peternakan kekuasaan.

Perternakan kekuasaan yang sudah menjadi pengetahuan umum pada setiap Pilkada sebagai bentuk arena perjudian politik (*political gambling*) dan sekaligus penelanjangan martabat atau marwah demokrasi.

Penyataan Prof Mahfud MD mengenai keterlibatan cukong dibalik Pilkada sebagai sinyal lonceng kematian demokrasi. Demokrasi telah dibunuh oleh para oligarki, para mafia Pilkada dimana pesta demokrasi yang katanya sebagai pesta rakyat tidak lebih sekedar arena tepuk tangan dan hiruk-pikurk yang meaningless.

Pilkada tidak lebih arena adu gengsi para cukong yang membandari Pilkada. Pilkada bukan saja pertarungan diantara para lkandidat, akan tetapi yang bertarungan adalah para cukong dan bisa saja para cukong itu bermain dua kaki untuk kandidat.

Permainan politik dua kaki para cukong ini karena para cukong tidak pernah berpikir atau memandang Pilkada sebagai arena demokrasi untuk melahirkan

calon kepala daerah yang kapabel untuk memimpin daerah dan mensejahterakan rakyat. Alih-alih berpikir seperti ini, kalau perlu bagaimana cukong-cokong itu memanipulasi pesta demokrasi dengan berbagai modus untuk memenangkan kandidat yang dibandari itu sebagai penguasa daerah.

Penguasa daerah itu akan menjadi kacung, kebijakan dan regulasi yang dibuat penguasa daerah itu tentu saja akan menguntungkan kepentingan bisnis dan politik para cukong.

Lebih jauh, para kepala daerah yang tersandera akan terus menerus para cukong termasuk menempatkan orang-orang atau loyalis cukong-cukong dalam struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan atau birokrasi secara otomatis bercorak paternalistik dan feodalistik.

□

4.

Pilkada: Bos Lokal dan Arena Beternak Politik

JUDUL tulisan ini diinspirasi oleh tulisan Ryan Fans, 2012, *Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia*, Edward Aspinnall dan Fealy, 2003, *Local Power in Indonesia*, dan Mancure Olson, 1993, *Dictatorship, Democracy, and Development*.

Tulisan para peneliti dan pakar politik ini membantu memahami realitas sosiologi politik dan peta bumi (*political geographi*) dinamika politik lokal dan nasional. Argumen utama tulisan ini adalah mencari sebuah penjelasan teoritik mengenai pola relasi antara aktor dalam kontestasi demokrasi.

Kontestasi demokrasi yang terlibat bukan saja para kandidat dan partai politik (Parpol) pengusung para kandidat. Selain itu, keterlibatan aktor lainnya, misalnya

aktor bisnis dan sejumlah kelompok kepentingan lainnya turut terlibat dalam proses demokrasi.

Proses demokrasi atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah arena bertemunya kepentingan para aktor, aktor lokal dan pusat. Pengalihan atau mobilisasi sumber daya politik, ekonomi dan sosial, serta sumber daya lainnya tidak terhindari. Masing-masing kandidat saling menakar kekuatan dan kelemahan lawan.

Pilkada adalah arena perang perebutan wilayah kekuasaan, kekuatan politik dan kekuasaan ekonomi. Pilkada adalah arena menakar loyalitas basis patronase dan klientelisme. Pilkada adalah instrumen transaksional dan peternakan politik yang didesain para aktor politik lokal dan pusat.

Seperti kita ketahui, kontestasi demokrasi di negeri ini sudah menjadi industri politik. Ya, desain demokrasi telah menjadi industri politik dan pertarungan Pilkada pun menjadi keras, melelahkan dan bahkan tidak jarang diwarnai cara-cara mafia, skandal, dan kriminal, demikian kata Prof, Mary Mcoy, 2019, dalam buku *Scandal Democracy and Political Communication on Indonesia*.

Mary Mcoy adalah professor politik dari Wisconsin University, Amerika Serikat, melakukan riset politik mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia pasca

Orde Baru. Mary Mc Coy, secara umum menggambarkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah diwarnai cara-cara kriminal dan scandal yang melibat sejumlah aktor politik dan aktor bisnis.

Senada Mary Mc Coy, Richard Robison dan Vedi R Hadiz, 2004, muncul scandal demokrasi atau kriminal demokrasi sesungguhnya tidak lepas dari struktur dan corak kekuasaan *crony capitalism and patrimonial state* (kroni kapitalisme dan negara bercorak patrimonial).

Oleh karena itu, dapat dipahami bila praktik demokrasi dan birokrasi dalam mengelola kebijakan negara sangat kental nuansa feodalisme struktur patronase sebagai dampak proses demokrasi atau Pilkada.

Benih-benih peternakan kekuasaan politik yang disemai para aktor atau orang-orang yang terlibat dalam proses demokrasi (Pilkada) akan tumbuh subur dalam pemerintahan.

Peternakan kekuasaan politik dan bahkan kekuasaan ekonomi tidak saja ada dalam kekuasaan pemerintahan bahkan juga terjadi di lembaga legislatif dan posisi-posisi kekuasaan lainnya. Model beternak kekuasaan politik dan ekonomi ini telah menyebar di daerah dan pusat.

Para penggambala itu menurut Profesor Jeffery Winters (2014) dalam bukunya *Democracy and Oligarchy*

disebut sebagai oligarch. Para oligarch ini adalah sekelompok orang yang menguasai dan mengendalikan kekuatan politik dan ekonomi, menunggangi dan membajak demokrasi.

Demokrasi dibantai dan diamputasi sesuai selera para oligark dan salah satu arena pembantaian demomrasi ligan adalah Pilkada, ketika wajah Pilkada berlumuran politik uang dan diwarnai keculasan.

Pembantaian yang paling kejam adalah ketika Octagon Pilkada (Pangwaslu, KPU dan instrumen demokrasi) lainnya diintervensi oleh kekuatan oligark atau kekuatan tertentu sehingga proses demokrasi menjadi absurd.

Semua itu bisa terjadi. Ryan Tans peneliti dari Emory Univerisy, Amerika Serikat, menemukan sejumlah fakta ketika melakukan penelitian di Sumatera. Temuan Ryan Tans memberikan konfirmasi akademik, para aktor politik telah memanfaatkan institusi kekuasaan, khususnya incumbent yang oleh Ryan Tans disebut sebagai mobilizing resources and building coalitions.

Seperti disebutkan diawali tulisan ini, Pilkada bukan saja para kandidat yang berlaga dalam perebutan wilayah kekuasaan, tetapi ada sejumlah kepentingan. Pilkada adalah pasar. Arena transaksional dan kerumunan orang yang memiliki berbagai kepentingan.

Wilayah kekuasaan politik adalah wilayah kerumunan, oleh Blank, 2006, disebut sebagai pasar, arena jual-beli barang dan jasa, demikian Blank dalam tulisannya, *Is the Market Moral?* Dalam ruang pasar perpolitikan tidak lagi bersifat individualitas, semua berubah menjadi kerumunan.

Boleh jadi kontestasi demokrasi (Pilkada) oleh Foud Anami, 2008, dari John Hopkins Univwraity, USA, disebut sebagai *the political of crowd*, sekadar kerumunan politik.

Deskripsi tulisan ini, saya ingin menjelaskan lebih fokus dalam kontek lokalistik, dinamika politik Kalimantan Selatan. Realitas peta bumi sosio politik di Kalimantan Selatan (Kalsel) dapat membagi dua klaster wilayah kekuasaan politik dan ekonomi. Yaitu klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Masing-masing klaster memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Yaitu kawasan yang menjadi epicentrum tambang batubara.

Tetapi yang terpenting dari *political resources* dan *economy resources* adalah antara Banjar Pesisir (Kotabaru, Tanah Bumbu, Plaihari) dan Banjar Daratan, masing-masing memiliki Bos Lokal (*local bossism*) meminjam istilah John Sidel, dan Orang Kuat Lokal (*local strongmen*), istilah yang dipopulerkan oleh Joel Migdal.

Para bos lokal kedua wilayah atau klaster ini adalah tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik lokal di Kalsel. Kehadirannya dalam kontestasi elektoral dapat dijelaskan dalam perspektif teori ekonomi politik. Kehadiran para oligarki lokal itu sesungguhnya tidak lepas dari kepeningatan bisnis dan politik atau *politics and business relationship*.

Oleh karena itu ketika mendiskusikan soal politik lokal Kalsel sesungguhnya konstruksi analisisnya tidak dapat dilepaslan dari kekuatan oligarki lokal dan bahkan oligarki lokal ini pun memiliki jaringan dengan oligarki yang ada di Jakarta. Jaringan ini bisa terbangun melalui partai politik atau jaringan bisnis.

Para oligarki atau bos lokal itu berlomba-lomba dengan pola strategi masing-masing melakukan pertena-kan kekuasaan politik, yaitu menempatkan para loyalis di lembaga legislatif dan eksekutif, serta pos-pos kekuasaan lainnya.

Para oligarki dan lokal bos menjadikan kontestasi elektoral yang mempertemukan kepentingan bisnis dan politik. Pilkada, bagi para oligarki dan bos lokal adalah arena menguat dan sekaligus arena ekspansi dan perebutan wilayah ekonomi. Siapa menguasai wilayah ekonomi, otomatis akan menguasai panggung politik lokal Kalsel.

Untuk memperkuat argumen ini, istilah roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson, 1993, dalam *Dictatorship, Democracy, and Development*, dalam memahami fenomena oligarki lokal di Kalsel. Teori roving bandit dan stationary bandit dari Olson itu menggambarkan suatu realitas kekuasaan ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh para oligarki dan kemudian menguras sumberdaya ekonomi yang ada untuk kepentingan pribadi dan para kroni bisnis dan politik.

Saya berpendapat para oligarki lokal atau bos lokal telah merefleksikan roving bandit dan stationary bandit dari Mancur Olson itu. Bisa jadi Octagon Pilkada me jadi arena adu gensi, adu show force para oligarki atau bos-bos lokal yang ada di Klaster Banjar Pesisir dan Banjar Daratan (Benua Enam). Drama kolosal Pilkada melodrama bertabur bintang oligark. Bintang-binyang oligarki lokal itu akan menyaksikan indahnya permainan politik pada 9 Desember datang.

Ini adalah arena adu nyali, adu gensi para oligarki atau bos lokal. Strategi dan amunisi akan dikeluarkan dari gudang persembunyian. Tidak hanya para kandidat gubernur yang panas dingin, harap-harap cemas, orang-orang yang terlibat dalam pesta itu ikut meriang dalam suasana Covid-19 ini.

Sebagai leading argument tulisan ini; Pilkada bukan saja sebagai proses demokrasi tapi juga arena pertarungan gensi bos-bos lokal di balik Pilkada itu. Pilkada menjadi pertemuan kepentingan para aktor lokal untuk membangun koalisi dan persekongkolan para aktor.

Pilkada menjadi arena peternakan kekuasaan politik oleh para oligarki untuk memuluskan penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik. Penguasa lokal pun akan menjadi sandera para oligarki dan Pilkada pun menjadi arena pasar gelap dalam aroma telenovelis.[]

5.

Menggantang Asap Demokrasi

SELEPAS kejatuhan pemerintahan Orde Buru 22 lalu, perjalanan demokrasi negeri ini semakin tidak jelas arahnya. Bagaikan biduk terobang-ambing di samudera luas tidak jelas arah mau dituju.

Konsolidasio demokrasi semakin porak poranda dan gerakan populisme radikal muncul dimana-dimana sebagai pertanda bahwa anak bangsa di negeri sedang berada dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sedang sakit.

Perjalanan panjang reformasi dan demokrasi seperti yang dijanjikan awal kejatuhan pemerintahan Orde Baru 1998 lalu ternyata tidak tidak seindah dalam imaginasi sosiologi atau imaginary orde yang menjadi kerinduan kolektif anak bangsa ini.

Anak bangsa ini telah gagap dan lunglai mendayung

biduk demokrasi menuju cita-cita reformasi yang dijanjikan. Biduk demokrasi seperti telah tersandera oleh karang oligarki yang mengiringi perjalanan demokrasi.

Demokrasi yang tersisa saat ini sekedar menisahkan kebebasan berkata-berkata dan kata-kata itu sebatas tontonan kamufase dalam bungkus kemunafikan. Kebebasan yang kita rasakan saat ini hanya kebebasan semu.

Sudah berapa banyak anak bangsa ini menjadi pe-sakitan alias masuk penjara karena mengekspresikan kebebasan berpendapat, kebebasan berimajinasi, dan mengkritisi kebijakan penguasa yang tidak populis serta penghamburan uang negara yang tidak jelas manfaatnya bagi rakyat.

Ya, inilah mitos demokrasi. Ilusi demokrasi. Adalah Professor Edward Aspinal, 2010, dalam bukunya *The Problems of Democratisation in Indonesia*, bahwa transisi demokrasi di Indoneaia sudah melahirkan sejumlah problem demokrasi.

Problem demokrasi itu bagaikan benang kusut yang sulit diurai. Transisi demokrasi itu telah memberikan struktur kesempatan bagi para aktor politik, para mafia politik, para kelompok kapitalis membajak demokrasi. Demokrasi telah dibajak oleh para mafia dan

memanfaatkan penguasa atau negara sebagai tempat berlindung secara legal.

Selanjutnya, buku Edward Aspinall, 2011, *Datar and Ilegality*, secara jelas mengungkapkan mengenai kelompok mafia, oligarki, dan predatoris berlindung dibalik kekuasaan dan merampok sumdaya ekonomi negeri dan mengendalikan kekuasaan.

Negara menjadi pesakitan para mafia politik, oligarki, dan predatoris itu. Sudah keringkah air mata reformasi itu. Reformasi telah terkubur yang tersisah hanya tulang-beluang yang berserakan dalam struktur imaginary order rakyat. Pengkhianatan reformasi. Kata yang pantas diucapkan secara massal bagi anak bangsa saat ini.

Reformasi politik dan ekonomi yang dihasilkan dari tetesan darah dari air mata 22 tahun itu hanya dinikmati dan menguntungkan sekelompok orang. Yaitu gerombolan mafia politik, oligarki, dan predatoris yang merampok sumber daya ekonomi, sumber daya alam yang kaya, dan mendikte kekuasaan.

Tidak salah bila Professor Jeffery Winters menyebut Indonesia sudah kuasai maling. Jeffery Winters dalam hal ini secara gamblang menulis dalam bukunya *Democracy and Oligarchy in Indonesia*, 2004, dan *On Oliharcy*, 2011.

Pikiran-pikiran ilmuan politik dari Amerika itu mengingatkan kita bahwa Indonesia di era demokrasi telah menyimpang sejumlah problem demokrasi. Salah satu problem demokrasi yang paling serius adalah bangkitnya kekuatan oligarki-predatoris yang berlindung di balik isu demokrasi.

Sumber daya alam yang kaya negeri ini sejatinya memberikan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan yang merata dipelosok negeri ini justru memperlihatkan ketimpangan sosial ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Para oligarki-predator itu telah menjarah dan menguasai tanah-tanah di negeri ini, terutama di Pulau Kalimantan yang kaya sumber daya tambang batubara.

Negara seperti tidak hadir ditengah kerakusan penguasaan lahan atau tanah para oligarki-predatoris. Ketidak-hadiran negara bisa saja menjadi bagian dari oligarki-predatoris itu. Bisa saja negara menjadi pemangsa (predatoris) bagi rakyatnya sendiri melalui kebijakan atau legalitas untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri secara ekonomi dan politik melalui sejumlah kebijakan dan atau regulasi.

Bisa saja berdalih atas nama kepentingan negara atau mengatas-namakan kepentingan negara (penguasa) berlindung dibalik kebijakan dan regulasi.

Pada hal seperti yang bisa diamati dalam perkembangan mutakhir, sejumlah kebijakan atau regulasi lahir dari kepentingan para kapitalis.

Salah satu kasus yang paling menarik adalah revisi undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang hanya menguntungkan pengusaha tambang batu bara. Revisi Minerba itu tetap disahkan di tengah resistensi publik dimana-mana.

Negara tampil sebagai komparasor bagi kepentingan korporasi katimbang membela kepentingan rakyat. Ini wajah negara yang tersandera kata Joel Migda dalam bukunya *Weak State and Strong Society*.

Sebetulnya apa yang dijanjikan gerakan reformasi politik dan ekonomi tahun 1998 lalu adalah upaya mereformasi institusi kekuasaan. Institusi kekuasaan model pemerintahan Orde Baru itu telah membawa negeri ke dalam sangkar besi otoritarianisme.

Model otoritarianisme Orde Baru itu sudah merusak nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan dan mengembangkan kritisisme. Negara tampil dominan bagaikan monster dan memangsa kelompok-kelompok kritis. Depolitisasi terhadap kehidupan rakyat dan lembaga-lembaga pendidikan adalah salah satu cara pembungkaman serta penyeragaman pola pikir rakyat.

Realitas politik saat ini di era demokrasi sesungguhnya foto kopi dari pola-pola rezim otoriter Orde Baru. Pola warisan Orde Baru (*the legacy of New Order*) akhir-akhir semakin jelas-jelas. Undang-undang ITE adalah salah satu instrumen penguasa saat ini yang paling mematikan kebebasan berdemokrasi. Itu salah satu sisi gelap jebakan demokrasi saati.

Demokrasi telah menjadi kutukan bagi rakyat (*the curse of democracy*). Kekerasan politik dan menguatnya gerakan populisme semu yang mengatasnamakan nasionalis untuk melakukan pembenaran kekerasan.

Kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh agama yang dilakukan oleh sekelompok orang semakin marak akhir-akhir. Kenapa semua itu terjadi di era demokratisasi dan dinamika politik yang semakin liberal.

Di tengah framnented society, penguasa negari seperti kehilangan akal sehat mederive kekuasaan politik dan bisa saja negeri salah desain diawal-awal reformasi. Tulisan Ross H MCLeod dan MacIntyre, 2007, Indonesia: Democracy and the Promise a Good Governance.

Karya MCLeod dan MacIntyre ini menarik ketika menjelaskan carut-marut perpolitikan pasca Orde Baru. Lagi-lagi buku ini menyoroti mengenai hadirnya sekelompok orang menguasai kekuatan ekonomi dan

politik yang mendikte kekuasaan negara. Janji reformasi bagaikan mimpi di siang bolong, ilusi, dan mimpi berkepajang.

Kentestasi demokrasi atau pesta-poranya para penjudi politik (political gambling) tidak lebih sebagai orkestra melodrama yang membius rakyat ke dalam wilayah pragmatisme politik. pertanyaannya adalah demokrasi macam apa yang diperjuangkan? ini pestanya rakyat atau pestanya para pemilik modal atau pedagang politik dalam pasar Pilkada? Sebagai anak bangsa yang masih menganut paham demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ungkapan ini sudah klise dan hanya ada dalam teks demokrasi, pada hakikatnya sudah lama terkubur, menjadi bangkai, dan hiasan nisan demokrasi saat ini.[]

6.

Gurita Korupsi Politik dan Menjemput Ajal Anak Bangsa

PRAKTEK korupsi di negeri ini sudah tidak ter-bendung lagi. Praktek korupsi telah melumpuhkan institusi kehidupan bangsa. Nyaris sempurna dan tidak menyisakan, institusi mana lagi yang tidak tenggelam dimakan arus pusaran korupsi politik.

Korupsi itu terstruktur dan dilakukan secara berjamaah oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan bisnis. Negara ini telah menjadi lahan subur bagi peternakan korupsi. Menjadi epicentrum kejahatan politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Institusi negara telah terseret masuk dalam arus pusaran korupsi politik yang dimainkan oleh para aktor-aktor jahat. Tidak hanya itu, institusi negara menjadi

instrumen kolaborasi oleh para penjahat bisnis dan berlindung di baik institusi-institusi demokrasi, partai politik, dan institusi hukum.

Pada perkembangan mutakhir negeri ini, tiada hari tanpa menyaksikan para penjahat negara yang terperangkap dalam arus korupsi. Kemarahan kolektif rakyat tidak terbandung lagi. Kemarahan kolektif yang tersimpan dalam struktur hati dan pikiran, pada suatu saat akan menjadi ledakan massal yang tidak terbandung (*fluring up of social anger*).

Modus korupsi itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki dijadikan instrumen persekongkolan kejahatan politik dan politik melalui jaringan terstruktur. Jaringan terstruktur itu dengan cara penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk berburu upeti atau rent-seeking.

Jebakankorupsi politik (*capture political corruption*) di era mitos reformasi (desentralisasi, otonomi daerah, dan Pilkada langsung), terdesentralisasi dari level desa sampai pusat kekuasaan. Bagaikan Tsunami dan virus Corona membuat orang pada situasi ketakutan, panik, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena melibatkan aktor negara dan aktor bisnis.

Negara sedang dalam situasi kepanikan politik, ekonomi, dan kepanikan massal yang tidak tahu lagi

akan mencari perlindungan ke mana di tengah sulitnya mencari perlindungan kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Negeri sedang berada senjakala. Sedang menjemput ajal sebagai dampak dari persekongkolan jahat oleh elite politik yang menjual kekuasaan.

Kesedihan dan kegelisahan rakyat semakin mendalam ketika negara secara politik dan ekonomi telah dikuasai dan kendalikan para kartel, oligarki, dan komparador. Menguras sumber daya ekonomi, politik, dan martabat bangsa, demi keserakahan.

Pulau dijual, sumber daya alam dikuasai oleh asing yang dipersembahkan oleh Paduka Tuan Kunyuk dan Jenderal Kunyuk di tengah kemiskinan rakyat. Di tengah sulitnya rakyat mencari kerja. Di tengah berbondong-bondongnya rakyat negeri ini mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI/TKW, dan tengah puluhan ribu sarjana nganggur yang tidak jelas masa depannya.

Mengapa semua ini terjadi? Buku *State and Illegality in Indonesia* dan buku *Problems of Democrtatization in Indonesia*, setidaknya dapat membantu menemukan jawaban secara teoritik. Akar persoalannya ada pada sistem politik dan sistem demokrasi.

Sistem politik masih merepresentasikan otoritarianisme Orde Baru dalam kemasan yang berbeda, namun dalam substansi yang sama. Yaitu sistem

new otoritarianisme yang mewakili kepentingan para oligarki, para kartel, para komparador, untuk menguasai sumber daya politik dan ekonomi melalui modus patron-klien.

Modus patron-klien itu telah melumpuhkan pene-gakan hukum karena institusi-institusi hukum telah diperalat oleh para oligarki, kartel, dan komparador. Institusi-institusi yang mana lagi yang tidak didustakan?

Proses demokratisasi saat ini, yaitu demokrasi yang salah kaprah. Demokrasi yang kehilangan martabat. Demokrasi yang melahirkan para penjahat demokrasi melalui Pilkada yang berbiaya tinggi. Pilkada telah menjadi modus bagi menumbuhkembangkan para oligarki baru.

Oligarki baru itu lahir karena orang atau kandidat yang bertarung dalam kontestasi demokrasi yang memiliki kuasa modal, terutama modal uang. Lalu, demokrasi seperti apa yang sedang didesain pasca Orde Baru ini?[]

7.

Persoalan Pertambangan di Sultra jadi Soroton Pemerhati Tambang Indonesia

PERSOALAN pertambangan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi sorotan salah satu pemateri dalam kegiatan seminar Nasional yang dilaksanakan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka dengan mengambil tema “Kontestasi Politik dan Sumber Daya Alam di Tengah Pusaran Korupsi” di auditorium USN Kolaka, Rabu (20/3/2019).

Ialah Dr. Muhammad Uhaib As’ad yang merupakan dosen Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin sekaligus pemerhati tambang Indonesia, mengatakan Negara kita kaya akan sumber daya alam khususnya

daya industry ekstraktif dari sabang hingga merauke.

“Kalimantan selatan dan di Sultra ini semua kaya dengan sumber daya alam khususnya tambang, yang menjadi persoalan belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tambang,” katanya.

“Justru tambang ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan tetjadi proses pemiskinan di sekitar wilayah tambang, ada terjadi semacam bencana kemanusiaan terjadi sumber daya alam yang tidak melakukan eksploitasi secara baik karena umumnya pertambangan syarat dengan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan juga SDA ini. Apalagi di era demokrasisasi menjadi instrumen persengkongkolan para aktor lokal untuk sebuah kontraktasi kekuasaan sehingga tambang sudah tersandra oleh kepentingan-kepentingan politik, sehingga kebijakan yang di buat pemerintah daerah yang kerjasama dengan sektor swasta sering kali tidak menguntungkan masyarakat secara umum tapi orang-orang tertentu pengelola partai politik dan tambang juga menjadi arena praktek korupsi contoh pengeluaran izin tambang (IUP) sering sekali tidak sesuai dengan akuntabilitas dan transparansi dan proses yang lebih banyak dilakukan deal-deal kepentingan politik,” sorot ia.

Takhanya itu, bahkan lanjutnya, tambang memberikan dampak lingkungan kemudian kemiskinan masyarakat di sekitarnya, kemudian praktek pertambangan tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Itu yang terjadi selama ini, makanya industri tambang sekarang ini berbanding lurus dengan kerusakan SDA dan tingkat kesejahteraan ekonomi tidak akan pernah berubah,” paparnya.

Menurutnya, kehadiran tambang hanya menguntungkan pengusaha, kelompok tertentu, birokrasi, aparat keamanan dan orang yang berkepentingan. Parahnya masyarakat umum merana di tengah SDA yang melimpah.

Ia pun menyinggung soal regulasi yang di buat tidak pernah menguntungkan masyarakat, seharusnya DPR menjadi corong rakyat,

“Contoh di Kalimantan selatan hampir semua anggota DPRD berlatar belakang Pengusaha tambang tentu saja yang di buat regulasi memihak memihak kepentingan pengusaha. Nah salah satu cara agar regulasi berjalan sesuai aturan sebelum di buat ada publik hearing kepada masyarakat, hukum juga harus jelas, jadi regulasi yang jelas tanpa hukum sama saja bohong. jadi semua harus jelas dari regulasi, hukumnya dan politik, serta pemerintah, anggota DPR dan masyarakat ikut

terlibat mengawasi mengontrol industry tambang yang ada. Persoalan itu saya melihat hampir sama apa yang ada di Sultra ini. Olenya semua stakeholder dilibatkan (civil society) karena tambang ada sisi ekonominya untuk kemajuan daerah,” terangnya.

Ia menambahkan semua harus tegas menghadapi tambang ini, regulasi harus disusun sesuai UUD dan yang terpenting kesejahteraan masyarakat tambang yang perlu diperhatikan dengan melakukan pembayaran royalty, pemberian CSR, melakukan Reklamasi dan reboisasi, sehingga ada asas manfaat bagi masyarakat.

Ia pun memberikan saran kepada mahasiswa sebagai agen sosial control untuk lebih membangun komunikasi kepada pihak tambang. Apalagi lingkup kampus merupakan bagian dari masyarakat tentunya.

“Semisal bangun komunikasi dengan PT. Antam untuk bagaimana dana-dana yang memang untuk masyarakat bisa terealisasikan. Mahasiswa juga harus mengkritisi persoalan tambang ini jangan menjadi apatis apalagi wilayah kita telah dikuasai tambang yang kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk memperoleh yang menjadi haknya,” tandasnya.[]

8.

Jenderal Kunyuk dan Komparador

SECARA tidak sengaja ketika saya merapikan buku-buku perpustakaan pribadi, saya menemukan beberapa buku dengan judul yang sangat menarik. Saya katakan buku itu menarik karena bercerita mengenai: *Patron-Client Relationship, Bureaucracy Patrimonialism, Relations Politician and Business, State, Market, and Democracy, and Collaboration Actors and Power Money.*

Adalah Prof Edward Apsinall, Prof Marcuse Meiztner, Prof Meridith L Weiss, Prof Vedi R Hadiz, Prof Richard Robison, dan Dr Muhammad Uhaib As'ad. Seperti biasanya, dan sudah menjadi kebiasaan, saya harus membaca sejumlah literatur dan jurnal yang menarik untuk menambah adrenalin intelektual sebagai seorang akademisi.

Selain itu, karena sering mendapat undangan sebagai pembicara mulai dari kelas kampung-lokal maupun nasional-international dan kepentingan menulis di jurnal nasional dan internasional.

Lalu apa relevansinya tumpukan literatur dan teori itu dengan Jenderal Kunyuk dan Komparador itu? Ya, sekilas memang tidak ada persentuhan antara judul-judul buku itu dengan Jenderal Kunyuk dan Komparador bila dilihat dalam konteks diksi kata. Teori adalah alat atau instrumen analisis untuk membantu membangun leading argument. Fungsi teori adalah men-dialog-kan sebuah percakapan antara empirical problems dan theoretical problems.

Para akademisi atau peneliti, akan problematik dalam melakukan penelitian, khususnya dalam penelitian sosial kalau tidak memiliki instrumen teori yang memadai. Sekali lagi, fungsi teori adalah upaya membedah realitas sosial secara academicly.

Semua orang suka makan durian apalagi durian Kasongan. Tapi bagi orang yang mengidap penyakit kolestrol tinggi, durian itu bukan menjadi rahmat, justru menjadi bencana. Aroma durian itu sangat menyengat dan akan sia-sia bila tidak dibuka atau dibelah. Cara membelahnya pun harus hati-hati karena punya duri bisa saja membuat tangan terluka.

Tidak mungkin dibelah memakai jari-jari tangan, digigit atau dibanting. Alat paling aman dan efektif dengan pusau atau parang. Instrumen pisau atau parang itu adalah teori untuk memahami (*how to understanding*) secara genuin realitas durian itu.

Apakah memang betul durian Kasongan itu mewakili narasi si penjual durian atau narasi publik yang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa durian Kasongan enak, manis, isinya tebal, dan sebagainya. Atau isinya penuh ulat blatung? Karena sudah terbiasa berperilaku mental instant, sejatinya durian itu belum saatnya dipanen tapi dipakasa dipanen dan bisa dimanipulasi seakan-akan durian yang dipajang di perampatan jalan Kasongan itu mewakili realitas durian sesungguhnya.

Pada hal durian itu hasil manipulatif, hasil mobilisasi, hasil persokongkolan antara para penjual atau para rezim durian. Durian itu ternyata hasil karbitan untuk mempercepat proses pematangan secara manipulatif untuk mempercepat mendapatkan keuntungan ekonomi secara instant.

Jaringan para aktor atau rezim durian itu mempromosikan dengan berbagai pola strategi, mulai dari semyum manis dilirikan mata artis Dewi Pesik. Para komparador durian itu habis-habisan melakukan *economic marketing* melauai sejumlah resources yang di-

miliki. Salah satunya adalah mengandalkan kekuatan modal untuk menjadi pengepul tunggal pedagang durian.

Sang patron pun tersenyum sembari membisikkan kata kepada sang Jenderal Kunyuk, kepada sang Komparador, kepada sang Broker, you are great, you are amazing, kawan. “Kalau perlu kuasailah semua jaringan pedagan durian dan berbagai macam jenis durian secara silent dan genuin.

Jangan ada dusta di antara para pengepul. Laksanakan tugasmu secara cerdas, Jenderal Kunyuk, pesan sang pantro penguasa Kerajaan Fikitif Nusantara. Strategi menguasai pangsa pasar harus dilakukan dengan berbagai pola untuk menginjeksi kesadaran kolektif para pecinta durian.

Kenapa hanya durian Kasongan? Durian Montong juga enak, cantik, seksi, bahenol dan besar. Montong berasal darla bahasa Thailand artinya bantal. Durian Montong (Durian Bantal).

Ini strategi jitu memperebutkan wacana publik secara akal-akalan, manipulatif dalam ditengah realitas kedunguan yang tidak terbantahkan. Para komparador bisnis dan politik bermain secara apik dan memainkan drama-drama sesasional ala Dramaturgi sosiolog Erving Koffman dalam karpets merah yang dipapajang di altar istana Kerajaan Nusantara Fikitif.

Belatung ya Belatung, Durian Kasongan ya Durian Kasongan, Durian Montong ya Durian Montong.

Persoalannya bukan bukan soal belatung dan arama durian tapi yang menjadi problematik adalah tidak adanya ruang bagi publik untuk memilih alternatif di tengah hegemoni dan koptasi para rezim durian atau para komparador.

Tidak ada lagi ruang tarung bebas bagi para publik sementara para publik diinstruksikan bertepuk tangan oleh para komparador atau para rezim di tengah ketidakpahaman publik. Sementara di Jenderal Kunyuk hanya bisa tesenyum menyaksikan parade kegembiraan dalam pesta itu.

Lho sampean Pak Jenderal Kunyuk kok senyum-senyum saja kenapa tidak ikut larut dalam hiruk-pikuk itu? “Mas, saya kan hanya Jenderal Kunyuk tidak punya kuasa. Pangkat jenderal saya ini hanya pangkat jenderal fiktif. Tugas saya mengamankan Kerajaan Nusantara Fiktif ini. Mengamankan Sungai Gampa Empire saja, mas. Itu saja tugas saya kok.

Pangkat jenderal saya kontemporer saja kok, Mas. Tergantung sehat wal-afiat nya bos saya, patron saya. Kalau bos saya ambruk atau mengalami *crack down* secara politik atau kekuasaannya tidak bisa dipertahankan lagi karena resistensi publik, ya akan kembali ke habitat

saya sebagai pedagang baksi atau bergabung dengan kolega saya para kunyuk-kunyuk di hutan belantara.[]

9.

Para Pengusaha Tambang di Balik Pilgub Kalimantan Selatan

PENGAMAT Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan, Uhaif Asad, memprediksi sektor lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan, bakal menghadapi kerusakan masif setelah pilkada serentak. Musababnya, semua pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, disokong jaringan para pengusaha tambang batubara yang beroperasi di provinsi itu. Pilgub Kalsel diikuti tiga paslon, yakni Ziarullah Azhar – M. Syafi'i; Sahbirin Noor – Rudy Resnawan; dan Muhidin – Gusti Farid Hasan Aman.

Walhasil, kata dia, para juragan tambang seolah menjadi bandar politik dalam kontestasi pilgub Kalimantan Selatan. “Haji Isam memback up Sahbirin Noor, Muhidin latar belakang pengusaha tambang dan punya IUP. Zairullah Azhar bukan pengusaha, tapi dia bekas bupati Tanah Bumbu yang banyak menerbitkan izin pertambangan,” kata Uhaif, Jumat pekan lalu.

Pola hubungan ini, kata Uhaif, membuka ruang membangun strategi patronase politik demi mengamankan kepentingan bisnis para bandar politik. Itu sebabnya, ia meyakini akan terbentuk pemerintahan bayangan yang mengendalikan gubernur terpilih, khususnya kebijakan di sektor ekonomi dan politik lokal.

“Para sponsor ini menjadi shadow government. Pasti ada hidden interest, enggak ada makan siang gratis. Dalam konteks landscape politik di Kalimantan Selatan, selalu terkait isu pengelolaan tambang,” Uhaif menambahkan.

Sokongan duit para sponsor membuat proses demokrasi semakin liar dan memperkuat kapitalisasi politik. Masyarakat sebagai pemilih, ia melanjutkan, disuguhi panggung demokrasi yang sarat praktek politik uang secara masif dan terstruktur. Uhaif cemas akan terbentuk gaya pemerintahan pemburu rente dengan melegalisasi praktek culas lewat aturan.

“Kalau cerdas politik, intelektual, integritas, saya masih pilih Zairullah Azhar. Tapi kalau mau lingkungan hancur, ya Sahbirin. Kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Demokrasi sudah dibajak kekuatan modal di sini,” ucap Uhaif.

Peta penguasaan SDA di Kalsel terbagi dua kutub: Banua enam dan Tanah Bumbu. Muhidin berkongsi dengan H. Ijai menguasai Banua Enam, yang mencakup Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Adapun H. Isam (Andi Syamsudin), mengkavling SDA di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, dan Kotabaru.

Dalam wawancara dengan penulis, pertengahan Agustus lalu, Sahbirin Noor bertekad memperketat pemberian izin penambangan batubara dan mereklamasi galian tambang. Ia mengklaim, terboson ini tidak lantas mematikan usaha PT Jhonlin Group, korporasi kakap batubara milik H. Isam, yang bergerak di bidang eksploitasi batubara.

Ia pun bakal memperkuat perekonomian Kalimantan Selatan pada sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. “Kami (Jhonlin) tidak akan tergantung pada tambang. Kami tidak merasa terancam, karena kami bekerja untuk rakyat dan membangun ekonomi

kerakyatan di sini,” kata Sahbirin Noor.

Analisa ini agaknya paralel dengan hasil perolehan suara pilgub Kalsel. catatan penulis, dari 8 provinsi yang menggelar pilgub serentak, hanya Kalimantan Selatan dengan selisih perolehan suara sangat tipis. Pilgub Kalsel kali ini pun sejatinya menjadi arena pertarungan para pengusaha lokal tambang batubara.

Sehari sebelum rapat pleno penetapan hasil pilgub Kalsel pada Sabtu, 19 Desember, real count KPUD Kalimantan Selatan pada Jumat ini menunjukkan Sahbirin Noor – Rudy Resnawan sementara unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin – Gusti Farid Hasan Aman meraup 719.938 suara (40,41%), dan Zairullah Azhar – M. Syafi’i sebanyak 330.070 (18,53%). Data masuk sudah 99,07% atau 8.628 dari 8.709 TPS se-Kalsel. Adapun jumlah DPT di Kalsel sebanyak 2,8 juta pemilih.[]

10.

Munajat 212: Mobilisasi Dukungan terhadap Prabowo-Sandi

APAPUN alasannya, acara Munajat 212 tidak lepas dari mobilisasi dukungan terhadap paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Terlepas siapa aktor yang memobilisasi massa tersebut, yang dikemas dalam acara Munajat 212 sangat kental nuansa kepentingan politiknya.

Saat ini, kita tidak bisa lagi memperdebatkan acara-acara semacam Munajat 212. Anggap saja kegiatan itu bagian dari hak demokrasi rakyat. Terlebih, kita tidak bisa menghalang-halangi rakyat. Apalagi sekarang ini, rakyat sudah berada di era keterbukaan demokrasi.

Masyarakat saat ini *gak* bisa lagi diatur lagi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Mereka sudah punya pilihan politik sendiri. Entah ke Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi. Tinggal bagaimana rasionalitas masyarakat itu dalam menentukan pilihan.

Saya melihat, sebagian besar massa yang hadir di acara Munajat 212 juga sadar bahwa acara yang mereka ikuti merupakan bentuk dukungan terhadap Prabowo-Sandi. Artinya, mereka adalah orang-orang yang menginginkan Prabowo-Sandi jadi presiden.

Kegiatan tersebut bagian ekspresi masyarakat dalam euforia demokrasi elektoral Pilpres 2019. Biarlah masyarakat menentukan pilihannya. Ketika ada gubernur “memobilisasi” masyarakat untuk mendukung capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, mengapa rakyat “tidak boleh” mobilisasi diri membangun kekuatan untuk mendukung Prabowo-Sandi? Jadi, sekali lagi, kita tidak bisa menghalang-halangi.[]

11.

Pengamat: Kepala Daerah Hanya Jadi Kacung Oligarki

PENGAMAT Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As'ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya jadi pembantu atau <kacung> para kelompok oligarki di tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2020 ini turut memiliki karakter yang sama.

“Sebetulnya kepala daerah yang *elected* di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh *local oligarchy* atau *national*

oligarchy,” kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada rakyat. Kepala daerah itu, kata dia, pasti berpihak pada kepentingan oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat Pilkada digelar.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan

pelayan rakyat menjadi 'klien' pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.[]

12.

Perselingkuhan Bisnis dan Politik: Suatu Peta Teoritik

PADA masa rezim Orde Baru berkuasa, negara tampil sebagai oligarki-predator ekonomi dan politik yang mengakumulasi jaringan bisnis dan politik. Jaringan bisnis dan politik tidak saja melibatkan aktor-aktor politik di dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga keterlibatan para pemilik modal (*capital*) yang menjadi kroni atau klien bisnis (*client*) penguasa Orde Baru.

Situasi ini secara gamblang dijelaskan oleh MacIntyre (1991) dalam karyanya *Business and Politics in Indonesia*. Demikian pula Robison dan Hadiz (2004), *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy an Age of Market*. Menurut MacIntyre (1991); Robinson dan Hadiz (2004), mengatakan bahwa kekuasaan oligarki-predatoris telah menguasai sumber-sumber

ekonomi dan politik melalui struktur jaringan bisnis dan politik antara negara (*state*) dan modal (*capital*) dalam pola hubungan patron-klien (*patron-client relationship*).

Tumbangnya rezim Orde Baru telah mengubur sistem otoriter yang diiringi perubahan institusi kekuasaan yang lebih demokratis. Berakhirnya kekuasaan otoriter telah memberikan sebuah harapan baru panggung kekuasaan dalam pengelolaan negara yang demokratis. Seiring perjalanan waktu di tengah transisi demokrasi dalam perkembangannya justru memberikan peluang dan kesempatan terjadinya perilaku *rent-seeking* dan korupsi politik (*political corruption*) bagi penyelenggara negara karena penyalahgunaan kekuasaan

Menurut Girling (1997) dalam bukunya: *Corruption, Capitalism and Democracy*, perilaku *rent-seeking* dan korupsi politik tidak hanya melibatkan aktor yang ada dalam institusi pemerintah, tetapi juga keterlibatan para pemilik modal dan politisi dalam jaringan terstruktur. Bila merujuk pada konsepsi demokrasi, jaringan bisnis dan politik dapat dijelaskan dalam konsepsi *lobbying*. Konsepsi *lobbying* adalah cara yang digunakan pemilik modal untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh politisi. Pada sistem pemerintahan yang berorientasi pasar akan selalu terbuka ruang *lobbying* yang dilakukan pemilik modal terhadap politisi

sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh negara untuk membela kepentingan pemilik modal atau *business confidence* (Girling, 1997: 21).

Adalah Jain (2002) dalam bukunya: *Corruption and Rent Seeking* memberikan catatan bahwa perilaku *rent-seeking* dapat dikategorisasikan sebagai korupsi ketika pemilik modal yang melakukan lobi memberikan uang atau upeti kepada pejabat publik. Perilaku *rent-seeking* yang dikategorisasikan sebagai korupsi dapat dihubungkan dengan sistem pasar yang monopoli. Perilaku *rent-seeking* tidak sekadar dipahami apakah legal atau ilegal karena justru pejabat publik yang menciptakan peraturan untuk melegalkannya.

Perselingkuhan Bisnis-Politik di Era Demokratisasi

Memahami jaringan bisnis dan politik di era demokratisasi yang melahirkan praktik *rent-seeking* tidak bisa dilihat sekedar pada apa yang terjadi saat ini. Untuk itu perlu merujuk bagaimana jaringan bisnis dan politik terjadi di era Orde Baru yang menciptakan sistem oligarki yang dikuasai oleh konglomerat Tionghoa dengan pola patronase yang terpusat pada Soeharto. Rezim Orde Baru dengan segala kekuasaannya menjadi pelindung pemilik modal (konglomerat) melalui pemberian lisensi dan monopoli sebagai bentuk oligarki predatoris. Oligarki predatoris ini berada di antara

kepentingan politis-birokratis dan pemilik modal menggunakan kekuasaan negara demi kepentingan pribadi dan para kroni bisnis.

Robison (1986) mengemukakan, pola jaringan antara negara dan pemilik modal cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat karena dalam pembuatan kebijakan ada proses saling pengaruh-mempengaruhi antara kepentingan negara dan pemilik modal yang cenderung melindungi kepentingan kelompok pemilik modal yang berusaha mencari rente.

Yushihara Kunio (1991) dalam karyanya Kapitalisme Semu mengatakan, kapitalis yang hidup di Indonesia sebagai *ersatz capitalism* atau kapitalisme semu. Dalam pandangan Kunio, gejala *ersatz capitalism* disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, campur tangan pemerintah terlalu besar sehingga prinsip persaingan bebas dan membuat kapitalisme tidak dinamis. *Kedua*, kapitalisme di Asia Tenggara tidak didasarkan perkembangan teknologi yang memadai, akibatnya tidak terjadi industrialisasi yang mandiri. Kedua faktor itu menyebabkan berkembangnya borjuasi palsu yang selalu minta perlindungan politik demi kepentingan bisnisnya. Para kapitalis yang menjalin hubungan dengan pemerintah demi mempermudah kelancaran bisnis atau mendapatkan keuntungan ekonomi disebut pemburu rente (*rent-seekers*).

Berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, desentralisasi dipandang sebagai dasar membangun demokratisasi, setiap warga memiliki hak terlibat dalam proses demokratisasi dan memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Seperti dikemukakan Shidiq (2003), pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan *public service* sesuai yang diinginkan warga daerah.

Di era demokratisasi telah merubah desain institusi kekuasaan, demikian pula menguatnya jaringan bisnis dan politiksi daerah. Natasha Hamilton Hart (2007) dalam tulisannya *Government and Private Business: Rents, Representation and Collective Action* mengemukakan bahwa jaringan bisnis dan politik di era demokratisasi mengalami perubahan bila dibandingkan pada masa rezim Orde Baru. Menurutnya, para pemilik modal menjadi salah satu *the agent of political power* dalam proses politik di eksekutif atau di legislatif. Proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini justru tidak diiringi perubahan perilaku oligarki para elite politik dalam struktur kekuasaan. Sementara itu, para pemilik modal berlomba-lomba mencari kesempatan untuk memanfaatkan institusi kekuasaan atau partai politik untuk mempengaruhi regulasi atau kebijakan

negara melalui pola-pola transaksional.

Terbangunnya relasi yang bersifat informal antara aktor negara dan pemilik modal dengan pola patron-klien adalah untuk mendapatkan kemudahan dan proyek dari negara. Di era reformasi telah bertransformasi melewati rezim otoriter ke era demokratisasi dimana negara dan pemilik modal berada dalam wilayah persekongkolan yang saling menguntungkan. Fenomena seperti dapat dilihat dari penjelasan teoritik Professor Krueger (1974) dalam karya klasik *The Political Economy of Rent- Seeking Society*. Krueger menjelaskan, usaha untuk mendapat lisensi inilah yang kemudian oleh Krueger disebut aktivitas *rent-seeking*, sementara kekuasaan yang dimiliki negara untuk membuat lisensi memungkinkan untuk mendapatkan bagian keuntungan dari perburuan rente.

Jaringan yang individual pemilik modal yang memburu rente dan negara yang memiliki kebijakan dalam prosesnya banyak menghasilkan kesepakatan yang berada di luar struktur lembaga formal. Era demokratisasi, karakter elite yang predatoris tidak menghilang dengan sendirinya. Praktek gelap ini tetap subur walaupun sistem lebih terbuka telah dijalankan. Menurut Ari Kuncoro (2006) dalam tulisannya *Corruption and Business Uncertainty in Indonesia* menjelaskan bahwa perilaku *rent-seeking* berfokus pada

penyuapan dari produk-produk regulasi negara seperti pemberian izin, proteksi industrial, dan hak monopoli.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sejak dilakukan pilkada langsung pada 2005 hingga Desember 2013, tercatat sebanyak 311 dari 530 kepala daerah terjerat kasus hukum, 86 persen di antaranya kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dalam pola relasi kekuasaan dan pergeseran peta korupsi yang dulunya tersentralisasi kemudian berkembang menjadi terfragmentasi ke-tingkatan yang lebih kecil. Perilaku *rent-seeking* pada era Orde Baru terpusat pada Soeharto. Pada pasca Orde Baru *rent-seeking* berpindah ke pejabat daerah. Beralihnya beberapa kewenangan ke daerah seperti pemberian izin pertambangan, lisensi lahan, dan hak guna usaha atas sumber daya alam beralih ke daerah telah berdampak pada pergeseran peta *rent-seeking* di era reformasi sekarang.

Chua (2009) dalam karyanya, *Capitalist Consolidation, Consolidated Capitalist* menjelaskan, perubahan institusional pasca Orde Baru sebagai upaya mengakhiri rezim otoriter praktek KKN melalui perubahan institusional, tetapi pada prakteknya perubahan tersebut justru dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki ekonomi dan politik sisa-sisa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan. Kembalinya para

oligark di era pemerintahan reformasi telah menguasai panggung demokrasi dengan melibatkan dari dalam kartel partai politik. Para oligark yang berlatar belakang pengusaha, juga sebagai politisi yang menguasai partai politik.

Di era reformasi, para oligark ini memposisikan diri ke dalam jaringan patronase telah terdesentralisasi mengikuti pola arus kekuasaan ke daerah seiring pelaksanaan Pilkada langsung yang memerlukan biaya besar (*over spending money*) (Chua, 2009: 217-218). Sebagai salah satu strategi, yaitu memanfaatkan perubahan institusional atau transisi demokrasi, para oligark menjadi pemain baru dalam panggung demokrasi saat ini.. Mereka dulunya secara terpusat dibesarkan dalam pusaran patronase Orde Baru, kini para oligark baru ini lahir di daerah terutama daerah yang memiliki potensi sumber daya alam semakin memberikan peluang munculnya oligark baru di daerah.

Shidiq (2003: 196-198) dalam artikelnya *Decentralization and Rent-Seeking in Indonesia*, menjelaskan bahwa desentralisasi membuat *rent based on transfer* berpindah dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah yang menyuburkan praktik korupsi dan *rent-seeking* di daerah. Aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan paternalistik, elite pusat maupun elite lokal sama-sama

berwatak predatoris yang mengakumulasi sumber daya ekonomi dan politik di darah. Seperti dijelaskan oleh Hadiz (2004), para oligark-predatoris adalah pejabat publik yang menguasai sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan kerabatnya.

Hal ini dipertegas oleh Peter Evans dalam karyanya: *Predatory, Developmental, and Other Apparatuses: A Comparative Political Economy Perspective on the Third World State*. Evans menjelaskan bahwa keberadaan oligark-predatoris erat hubungannya dengan keberadaan birokrasi yang patrimonial bila merujuk pada teori birokrasi Max Weber (Evans, 1989: 567). Evans menyebut keterlibatan pemilik modal yang mempunyai jaringan dengan para birokrat dan politisi bila dilihat dalam perspektif *rent-seeking*, menurut Peter Evans sebagai bentuk korupsi karena sumber daya milik negara tidak teralokasikan untuk keperluan warga, tetapi masuk ke aparatur negara dan kerabatnya. Perilaku aparatur negara ini seperti disebutkan sebelumnya erat hubungannya dengan model birokrasi yang patrimonial.

Era reformasi dan desentralisasi telah menjadi pusaran perebutan sumber kekuasaan ekonomi dan politik, para elite lokal mengambil alih atas kontrol sumber daya yang selama ini dipegang oleh pusat. Hal ini terjadi persoalannya bukan pada desain yang

salah dari proses reformasi dan desentralisasi, tetapi kurangnya komitmen elite lokal dalam menjalankan reformasi dan desentralisasi. Problem reformasi dan desentralisasi timbul karena masih adanya kekuasaan predatoris sisa-sisa warisan Orde Baru. Dalam reformasi dan desentralisasi, hubungan patronase telah terdesentralisasi dan lebih cair di level daerah.

Jaringan bisnis dan politik di era reformasi lebih terbuka karena pengaruh perubahan institusional sebagai dampak reformasi dan proses demokratisasi yang membuat pola *rent seeking* sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di masa Orde Baru. Di era desentralisasi dan demokratisasi, pemilik modal menggunakan perubahan institusional untuk tetap bertahan hidup dan pola *rent-seeking* pun lebih terdesentralisasi.

Perilaku *rent-seeking* yang bertransformasi dari Orde Baru dan bisa bertahan di era reformasi, setidaknya ada tiga faktor, antara lain: *Pertama*, kekuatan struktural yang menguasai perekonomian saat ini relatif masih sama dengan kekuatan yang ada pada era Orde Baru. Para aktor ekonomi di era Orde Baru telah bertransformasi dengan memanfaatkan perubahan institusional untuk bertahan hidup. *Kedua*, pola hubungan kekuasaan yang predatoris serta beberapa tokohnya baik nasional dan lokal sama-sama berwatak predatoris. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan untuk

menjalankan perubahan pasca reformasi menggunakan *neo-institutionalisme* yang mengabaikan relasi kuasa di antara aktor ekonomi-politik. Perpaduan dari ketiga hal tersebut kemudian membentuk kontinuitas atas relasi yang dulu terbangun di masa Orde Baru sehingga melahirkan pola jaringan bisnis dan politik yang berbentuk *rent-seeking* dapat dipertahankan.

McIntyre (1991) menjelaskan bahwa jaringan bisnis dan politik yang melahirkan perilaku *rent-seeking* bisa di lihat dari dua hal: *Pertama*, keterlibatan pemerintah (negara) di dalam bisnis. *Kedua*, keterlibatan bisnis dalam kehidupan politik. Seiring perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari yang semula dipilih oleh DPRD ke pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan pilkada sebagai suatu arena kompetisi yang mahal dan menimbulkan konsekuensi masuknya kelompok pemilik modal di dalam arena politik baik sebagai calon kepala daerah maupun donatur dalam proses pilkada.

Jaringan bisnis dan politik antara elite politik dan pemilik modal bisa di lihat dari pendanaan yang di berikan oleh pemilik modal kepada calon kepala daerah yang berkompetisi, mulai dari dana pembelian partai pengusung hingga dana kampanye yang besar. Dalam hal ini, kepala daerah akan memberikan konsesi sebagai balas jasa melalui pemberian proyek-proyek

dan kemudahan kepada pemilik modal yang telah berperan sebagai *political broker* (As'ad dan Aspinall, 2014; Hidayat, 2006).

Jaringan antara pemilik modal dan elit politik sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara yang demokrasinya telah mapan seperti Amerika Serikat pun terdapat banyak kasus yang menunjukkan betapa kepentingan bisnis begitu besar dalam dunia politik. Lary M Bertels dalam studinya tentang pemilihan anggota kongres menunjukkan bahwa sumbangan dana kampanye dari para pemilik modal kepada para senator mencapai 58,1% dari total dana kampanye. Sumbangan yang demikian besar yang di berikan para pemilik modal ini kemudian menjadi *bargaining position* buat pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan pemilik modal lewat kebijakan yang di keluarkan yang dalam level nasional, bahkan sampai pada deregulasi undang-undang untuk mengamankan bisnis pemilik modal yang dalam pandangan politik hal ini di sebut *bribes and kickback* (menyogok agar dipermudah).

Jaringan bisnis dan politik menimbulkan konsekuensi atas pembajakan demokrasi dengan terbentuknya kartel bisnis dan politik yang berwajah *rent-seeking*. Politik balas budi terhadap pemilik modal ini menyebabkan kekuasaan pemerintahan menjadi sarang korupsi. Hasil riset yang di lakukan *Indonesian*

corruption wach (ICW) tentang jaringan negara dengan pemilik modal menunjukkan bahwa jaringan ini menjadi basis praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterlibatan pemilik modal sebagai calon kepala daerah juga memberikan ruang untuk semakin terbangunnya kartel bisnis-politik.

Di era Orde Baru, kekuasaan Soeharto dianggap sebagai simbol korupsi di Indonesia. Era Orde Baru diklaim sebagai awal munculnya jaringan antara politik (kekuasaan) dan kepentingan bisnis. Para ahli ekonomi politik sepakat bahwa lapisan orang kaya cukup besar setelah Soeharto berkuasa sejak 1960-an yang diposisikan sebagai kekuatan oligarki ekonomi dan politik (Winters, 2011). Kekuatan oligarki adalah yang menguasai dan mengendalikan sumber daya ekonomi dan politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta para kroni yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini semakin jelas bahwa keruntuhan Orde Baru bukan berarti sebagai keruntuhan rezim yang korup, melainkan hanyalah pergantian pemegang kekuasaan. Sektor bisnis menjadi basis yang kuat untuk melanggengkan kekuasaan oligarki (Winters, 2010:7).

Bangkitnya kekuatan oligarki pasca orde Baru telah memainkan jaringan bisnis pada level lokal sebagai konsekuensi dari problem demokratisasi

karena terjadi pola pergeseran kekuasaan dari otoriter menuju demokratisasi (Aspinall and Mietzner, 2010; Hadiz, 2004). Seperti dikemukakan Hadiz (2010), demokratisasi yang sedang berjalan saat ini telah merubah institusi kekuasaan, tetapi tidak merubah perilaku oligarki dari para elite politik. Para elite politik justru berusaha membangun jaringan patronase terutama dengan pemilik modal dengan memanfaatkan institusi kekuasaan. Hal yang sama juga diungkapkan (Hidayat, 2006), perubahan institusional menjadi arena transaksional dan kompromi-kompromi kepentingan elite penguasa (*state actors*) pada satu sisi, dan elite masyarakat (*societal actors*) pada sisi lain.

Hadiz (2010) dalam karyanya *Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* menggambarkan bahwa pasca kejatuhan Orde Baru, kekuatan oligarki sebagai sekutu Soeharto telah berhasil mengamankan diri dalam pemerintahan. Jaringan patronase bisnis dan politik Soeharto masih menguasai struktur ekonomi dan kekuasaan politik di pemerintahan reformasi saat ini. Robison dan Hadiz (2004) mengatakan ada tidaknya perubahan demokratisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru ditentukan oleh ada tidaknya keruntuhan di dalam “*the social interests and relations of power in wich they were embedded*”.

Robison dan Hadiz (2004: 200) dalam Marijan (2011), mengatakan *“the conglomeraters and the big politico-business families of the Soeharto era proved less vulnerable than their predecessors”*. Bertahannya perilaku oligarki pasca Orde Baru akar persoalannya terletak pada kerangka institusi kekuasaan. Perubahan institusi kekuasaan tanpa diiringi perubahan fundamental dalam struktur relasi kekuasaan dan perilaku politik para aktor, sementara institusi kekuasaan telah dikuasai para oligarki.

Memahami fenomena oligarki pasca Orde Baru ada yang menggunakan pendekatan kelembagaan baru (*new institutionalism*). Bagi yang menggunakan pendekatan kelembagaan baru beranggapan bahwa proses demokratisasi tidak saja tergantung pada perubahan struktur ekonomi dan politik tetapi juga berkaitan dengan pilihan kelembagaan politik (*political institutional design*). Seperti dikemukakan ilmuwan politik, James G. March dan Johan P Olson, *“political democracy not depend only on economic and social conditions but also on the design of political institutions”* (March dan Olson, 1984), karena seperti dikemudian Aspinall (2005); Jackson (1978); Liddle (1985); MacIntyre (1991), selama Orde Baru berkuasa, menguatnya oligarki ekonomi dan politik karena kekuasaan telah menguat berada pada lingkaran pribadi atau sekelompok yang membaja

demokratisasi atau institusi kekuasaan. Kekuasaan oligarki telah menguasai struktur ekonomi dan politik telah menjerumuskan bangsa ini ke dalam krisis ekonomi dan politik serta melahirkan ketidakadilan bagi rakyat.

Oligarki sebagai sebuah fenomena kekuasaan politik telah digunakan sejak satu abad silam. Adalah Robert Michels sosiolog Perancis pada tahun 1911 memperkenalkan istilah “hukum besi oligarki” untuk melihat fenomena partai politik di Eropa pada waktu itu. Menurut Michels, partai politik mempunyai kecenderungan bertindak oligarkis untuk memusatkan kekuasaan hanya pada segelintir orang yang berada di pucuk kekuasaan. Kecenderungan tersebut karena kepemimpinan dalam struktur organisasi yang hierarkis membuat para elite yang berada di pucuk kekuasaan menggunakan kekuasaan miliki untuk kepentingan mereka (Michels, 1911).

Fenomena oligarki juga dapat dibaca dari analisis mengenai *The Iron Triangle* dalam politik di Amerika Serikat abad 19 hingga awal abad 20. Seperti dikutip Pulitze dalam New York Times (18 Januari 1919) yang ditulis Charles Grastu, *The iron Triangle* merefleksikan *the bourborism of politician, the materialism of industrial and commercial circles, dan the militarism of professional silidiers*. Tiga domain tersebut mendominasi pengam-

bilan keputusan di Amerika Serikat, di kemudian hari dikenal sebagai *military industrial complex*. Pola relasi kekuasaan ini dinilai sebagai pola yang oligarkis karena memusatkan kekuasaan hanya pada segelintir elite.

Hadiz dan Robison (2004) menulis dalam salah satu karyanya bertema oligarki untuk menjelaskan fenomena ekonomi – politik di Indonesia pasca Orde Baru. Tema oligarki digunakan untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan yang menjadi lingkaran kekuasaan di Indonesia yang mendominasi struktur ekonomi dan struktur politik pasca Orde Baru. Oligarki dapat dipandang dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi politik, oligarki merupakan pemusatan kekuasaan pada segelintir elite yang menjalankan urusan publik dengan mekanisme kekuasaan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari teori Michels tentang “hukum besi oligarki” atau cerita mengenai rezim otoriter di era Orde Baru. *Kedua*, dari sisi ekonomi politik, oligarki merupakan relasi kekuasaan yang memusatkan sumber daya ekonomi pada segelintir pihak, yaitu relasi antara kaum pemilik modal dan elite politik yang saling menguntungkan secara timbal balik.

Robison (1985) dalam *Class, Capital and the State in New Order Indonesia* menggambarkan bahwa Orde Baru berhasil memperkuat struktur korporatisme (*corporatism*) untuk mengendalikan kekuatan ekonomi

politik. Robinson sampai pada kesimpulan bahwa meskipun setiap kebijakan tetap berada di dalam kekuasaan negara, namun pada satu sisi kekuatan pemilik modal sebagai aktor di luar negara (*extra-state*) sebagai kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi kebijakan negara.

Di dalam pandangan Robison, negara (*state*) dan modal (*capital*) merupakan sebuah hubungan patrimonial dan asosiasi korporatis (*corporatic association*) yang digunakan oleh negara sebagai alat untuk mentransformasikan kepentingan dalam proses kebijakan. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, misalnya, ketika politik sentralisasi dijalankan penguasa Orde Baru, negara memberikan legitimasi kepada kroni dan *client – businessmen* penguasa Orde Baru. Misalnya, Bob Hasan dan Probosutejo adalah kroni bisnis Orde Baru telah menguasai sumber daya hutan, perkebunan, dan lainnya di sejumlah daerah, seperti di Kalimantan, Sumatera. Demikian halnya dengan Liem Siong Liong yang menguasai sejumlah perusahaan adalah sebagian dari *main client–businessmen of Soeharto* (Crouch, 1985, Aditjondro, 2009).

Menurut Mas'oed (2003), negara Orde Baru adalah sebagai aktor otonom yang memiliki kemampuan untuk bertindak bertentangan dengan kepentingan kelas-kelas sosial. Demikian pula negara Orde Baru sebagai

variabel organisasional untuk menentukan perilaku aktor-aktor sosial. Dalam berbagai kesempatan negara Orde Baru membuktikan diri mempunyai kemampuan mengisolir pembuatan kebijakan publik dari pengaruh aktor-aktor di luar negara. Negara Orde Baru bahkan merupakan sumber kapital dan infrastruktur yang dimanfaatkan oleh sektor bisnis; negara juga pemberi proteksi bagi sektor bisnis yang tidak efisien. (Mas'ood, 2003).

Kemampuan untuk bertindak bebas dari pengaruh rakyat yang mengakibatkan elite penguasa untuk melakukan kebijakan *structural adjustment* tanpa menghadapi oposisi yang berarti. Tanpa ada aktor lain di luar pemerintah yang bisa mengimbangi, pemerintah Orde Baru bisa mempertahankan mekanisme kerjanya yang cenderung bersifat "dirigiste", yaitu menekankan kendali pemerintah atas proses ekonomi diwarnai oleh struktur patrimonial yang memelihara para pemburu rente (*rent-seekers*) (Mas'ood, 2003).

Berangkat dari paparan tersebut di atas, *puzzle* studi ini akan mengeksplorasi fenomena jaringan bisnis dan politik antara negara (*state*) dan pemilik modal (*capital*) pada level lokal pasca Orde Baru dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di era sentralisasi dan era desentralisasi yang masing-masing era melahirkan telah oligarki dalam perebutan dan penguasaan sumber-

sumber ekonomi negara di antara para aktor.

Selain itu, studi ini juga akan melihat kontekstualisasi perilaku *rent-seeking* dan karakter oligarki aktor Orde Baru yang bertransformasi dalam struktur ekonomi dan kekuasaan politik dalam pemerintahan reformasi. Bertemunya aktor lama Orde Baru dan aktor baru reformasi yang sama-sama berwatak oligarki telah memanfaatkan perubahan institusi kekuasaan, regulasi, dan isu desentralisasi membangun kolaborasi kepentingan bisnis dan politik. Para aktor politik dan aktor bisnis telah menguasai pengelolaan sumber-sumber ekonomi daerah seperti pengelolaan sumber daya alam, dimana aktor baru telah memposisikan diri sebagai oligarki baru. Jaringan bisnis dan politik yang menguat di daerah seiringan berjalannya proses demokratisasi dan desentralisasi telah numbuhsururkan perilaku *rent-seeking* dan oligarki predatoris “jilid kedua” dengan pola-pola patronase seperti yang telah dipraktekkan penguasa Orde Baru.

Birokratik Patrimonialistik dalam Pusaran Jaringan Bisnis- Politik

FENOMENA jaringan bisnis dan politik antara negara dan pemilik modal di Indonesia telah menjadi cerita lama dalam konteks ekonomi politik, terutama pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Orde

Baru. Kebijakan ekonomi rezim Soeharto dengan menggunakan justifikasi demi kepentingan nasional, padahal kebijakan tersebut sejatinya hanya demi menguntungkan para kroni dan kelompok-kelompok tertentu.

Dalam konteks Indonesia, perspektif *patrimonialism* dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena *rent-seeking behaviour* yang terjadi di antara birokrasi pemerintah dan dunia bisnis di masa lalu. *Patrimonialism* merujuk pada sistem politik di mana para penguasa mencari dukungan yang dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan materi, sebagai imbal jasa bagi penghormatan dan loyalitas bawahan kepada atasannya (Crouch,1979).

Menurut Mackie (1984), bahwa kekuasaan yang terpusat di sekitar jajaran ekonomi-politik telah menguasai sumberdaya alam, lisensi, kredit, dan faktor-faktor kunci lainnya yang menentukan akumulasi kekayaan (Irwan, 2000:68). Perspektif ini digunakan Robinson untuk mengamati karakteristik politik Indonesia semasa Orde baru yang menampakkan watak dirigisme (dalam Saidi, 1998:54). Terminologi dirigisme ini merujuk pada kecenderungan negara untuk melakukan intervensi pada pengelolaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun ekonomi (Saidi, 1998:54).

Menurut Robinson, watak d elaksanakan kebijakan pemerintah dipisahkan dari sarana-sarana produksi dan administrasi (Muhaimin,1991). Birokrasi patrimonial menurut kajian yang dikemukakan Eisenstadt memiliki ciri: *pertama*, pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik; *kedua*, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan; *ketiga*, pejabat-pejabat mengontrol, baik fungsi politik atau administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi; *keempat*, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik (Santoso, 1993).

Sedangkan menurut Vroom (1982), tipe birokrasi bergaya tradisional ini sebagai hal yang wajar dalam kultur setempat. Tipe ini dipandang layak bagisituasi-situasi lainnya, seperti misalnya dalam perusahaan bisnis atau wiraswasta. Kekuasaan dipusatkan pada puncak-puncak organisasi, sementara orang-orang yang mengurus pada umumnya para pemilik atau kaum kerabat yang cenderung menggunakan sebagai milik pribadi. Dalam hubungan dengan penguasa, para pengusaha berusaha untuk tetap menjaga kondisi yang stabil. Sebaliknya penguasa pun menggunakan posisinya untuk memanfaatkan bisnis tersebut demi kepentingan pribadinya.

Dalam pandangan Max Weber, lingkungan patrimonial dari sistem ini tidak merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi pada tahap-tahap awal pembangunan. Dalam suasana seperti itu, penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri akan memperoleh keamanan yang mereka perlukan dengan jalan menempatkan diri di bawah perlindungan patron-patron yang berkuasa di kalangan elite birokrasi. Akan tetapi untuk jangka panjang, jenis struktur ini mungkin menjadi hambatan serius bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena adanya ketidaksesuaian yang melekat pada struktur ini, antara kebutuhan suatu sistem kapitalis industri yang sulit diramalkan dengan gaya pemerintahan yang patrimonial.

Di era Orde Baru bersifat ambiguitas, pada satu sisi intervensi negara merkantilistik dan pada sisi yang lain kecenderungan untuk mengontrol ekonomi secara patrimonialisti. Intervensi negara, rezim Orde Baru menampakkan wataknya selaku negara predator, yaitu negara atau birokrasi menguasai dan mendominasi masyarakat, tetapi tidak mampu mewujudkan ide dan kemauan politik karena dikuasai oknum-oknum yang korup berkolusi dengan sektor swasta untuk kepentingan *vested interest* kolusi antar oknum. Negara predator ini tidak mampu melakukan lompatan sinergi yang efektif dalam menghasilkan kinerja yang bersaing

dengan negara lain. Pada posisi seperti ini, Max Weber memandang bahwa dalam birokrasi semacam ini bercorak patrimonial, di mana individu-individu dan golongan yang berkuasa mengontrol kekuasaan dan otoritas jabatan untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka.[]

13.

Respon Diskusi JaDi, Uhaib: Jangan Terlalu Menyanjung

MENGUSUNG tema “Refleksi 4 Tahun Kepemimpinan Gubernur Sahbirin”, Diskusi Awal Tahun 2020 digelar Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalimantan Selatan di di Hotel Nasa Banjarmasin, Kamis (23/1/2020).

Acara yang dibuka Koordinator Presidium JaDi Kalsel, Dr Samahuddin Muharram ini memaparkan tentang kinerja Gubernur Kalsel periode 2016-2021.

Tiga penyaji dihadirkan dalam diskusi sehari ini. Mereka yakni Rahmayanti dari Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (Bappeda), Noor Dachliyanie Adul SH MH dari JaDi Kalsel dan Dr H Achmad Yunani sebagai pengamat ekonomi.

Pada acara yang dipandu oleh Hj Mazeniah Elmi S.Ag ini, Yunani memaparkan data perbandingan pencapaian Kalimantan Selatan dengan di tingkat nasional berdasarkan perekonomian.

“Rata-rata tingkat perekonomian Kalimantan Selatan meningkat,” tutur Dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Diskusi berjalan aktif dengan dibukanya berbagai tanggapan dari audiens. Salah satu tanggapan dilontarkan pengamat kebijakan publik Universitas Islam Kalimantan (Uniska), M Uhaib As’ad.

Secara tegas Ia tidak setuju dengan adanya pengaminan pada apapun yang disampaikan atasan, dalam hal ini Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin.

Ia menyarankan untuk memberikan kritik dan saran sebagai bentuk kecintaan pada pemimpin.

“Mari kita diskusikan secara objektif, jangan terlalu confident memberikan sanjungan yang berlebihan,” pungkasnya.[]

14.

Demokrasi dan Oligarki Lokal: Refleksi Kritis Menyongsong Pilkada di Kalsel

BERAKHIRNYA pemerintahan Orde Baru setelah berkuasa selama 32 tahun telah melahirkan transisi demokrasi. Transisi demokrasi merubah instutisi kekuasaan otoriter menjadi lebih demokratis.

Di Era transisi demokrasi telah melahirkan para petualang politik atau penumpang gelap, yaitu sekelompok orang atau populer disebut oligark- predator (Vedi R Hadiz, 2011).

Para oligark lokal dan oligark pusat telah menguasai sumberdaya ekonomi dan politik negara. Transisi demokrasi menjadi arena persekongkolan secara legal yang dilindungi oleh penguasa (negara). Dalam hal

ini, (lihat buku *State and Ilegality in Indoneaia*, karya Edward Aspinal dan Van Klinken, 2010).

Tampilnya sejumlah Kompokol bisnis di arena panggung demokrasi saat ini, semakin meramaikan jagad perpolitikan lokal maupun nasional. Proses demokrasi yang semakin liberal tidak terbendung lagi dan demokrasi pun berjalan seperti tidak punya arah tujuan yang jelas.

Demokrasi telah menjadi mitos yang diformalkan oleh negara. Demokrasi ibarat pasar gelap dan menjadi arena perjudian kekuasaan dan praktek mafia demokrasi yang tidak terhindarkan (Mary McCoy, 2019).

Alih-alih membangun demokrasi substantive seperti yang diteorisasikan oleh William Case (2006), justru yang lebih menonjolkan wajah demokrasi formalisme dan prosedural yang sarat dengan pesekongkolan dan transaksional.

Kekuatan modal telah memangsa institusi negara, sementara partai politik tidak lebih sebagai instrumen pembaptisan para oligark lokal dan oligark pusat. Yang lebih menyedihkan lagi, partai politik menjadi arena pelembagaan feodalisme dan politik famili.

Mentalitas feodalisme dan politik famili yang bersarang di balik institusi partai politik itu, semakin membuka mata dan pikiran bangsa ini bahwa proses

demokrasi sedang berada di jalan yang sesat.

Tulisan Edward Aspinall, *Democracy for Sale* (2019) dan Tom Pepinski yang menyebut praktik demkoraasi di Indonesia saat sedang berada dalam fase *back sliding of democracy* (kemunduran demokrasi).

Peneliti asing tersebut, sesungguhnya telah memberikan argumen berharga, suka atau tidak suka bahwa bangsa ini telah mengalami defisit demokrasi atau darurat demokrasi (*the danger of democracy*) yang berkepanjangan.

Setidaknya ada dua argumen yang dapat dibangun untuk menjelaskan problem demokrasi saat ini. Pertama, proses demokrasi dan sistem politik yang lahir pasca pemerintahan Orde Baru lebih lebih merepresentasikan kepentingan para elite politik atau para oligark.

Oleh karena itu, apa pun produk demokrasi lebih mewakili kepentingan kelompok elite atau para oligark dari pada Kepentingan publik. Kedua, instrumen demokrasi telah dikuasai oleh elite dan menguasai instrumen demokrasi itu melalui proses demokrasi yang sarat politik uang dan persekongkolan.

Perlu dipahami bahwa tidak selamanya kelompok oligarki- predatoris meduduki jabatan formal, misalnya di lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi berusaha menempatkan orang-orang atau para loyilis masuk dalam

lingkaran kekuasaan.

Orang-orang atau para loyalis yang diselundupkan masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan atau membiayai seseorang menjadi legislatif, setidaknya diharapkan menjadi agen patronase bisnis dan politik bagi kepentingan oligark Kekuatan oligark lokal dan pusat telah menyeret proses demokrasi ke wilayah kepentingan oligark.

Hal ini senada dengan ucapan Noreena Hertz (2011) dalam buku *The Silent Take Over*, bahwa demokrasi telah dibajak oleh kekuatan modal atau pasar. Pembajakan seperti ini kata Hertz biasanya dilakukan oleh kelompok status quo (anti perubahan), yang menghendaki bertahannya suatu kekuasaan dan ke kelompok-kelompok yang membawa kepentingan ekonomi dan politik.

Mentalitas seperti ini adalah refleksi dari mentalitas penguasa Orde Baru yang berusaha melanggengkan patronase politik dan ekonomi dalam genggamannya segelintir orang.

Proses demokrasi telah terkontaminasi oleh kelompok oligarki dan mendikte kebijakan penguasa lokal atau pusat dengan kekuatan modal dan memposisikan penguasa sebagai klien (*client*) dan Oligark (pengusaha) sebagai patron. Sebuah fakta paradoks di era transisi

demokrasi.

Konsolidasi demokrasi yang compang camping ini, walaupun institusi kekuasaan telah mengalami perubahan, namun perubahan itu tidak diiringi oleh perubahan perilaku aktor politik yang masih bermental oligarki-predatoris. Oleh karena itu, tidak aneh bila arah demokrasi menjadi oligarkis yang dikendalikan para aktor bisnis.

Seiring perjalanan demokrasi, kelompok oligark semakin terdesentralisasi ke level lokal. Fakta ini semakin memperjelas bahwa demokrasi oligarki semakin berkembang pasca pemerintahan Orde Baru. Demokrasi lokal telah dimanfaatkan oleh kelompok oligark membangun patronase politik dan bisnis.

Sengkarut landscap demokrasi saat ini, salah satu faktornya adalah karena mentalitas para elite politik masih bermental oligarki- predatoris karena desain demokrasi yang dibangun telah melegalkan praktek demokrasi oligarki. (Aspinall, 2010 dan Hafiz, 2011).

Sebagai leading argument untuk menjelaskan perilaku oligark-pradatoris yang terdesentralisasi di level lokal setidaknya dapat dijelaskan, antara lain: Pertama, penguasaan sumberdaya ekonomi (bisnis) dan politik saat ini relatif masih sama dengan mentalitas elite Orde Baru yaitu mentalitas keserakahan (predatoris).

Kedua, pola relasi kuasa, baik lokal atau pusat sama-sama berwatak oligarkis-predatoris. Ketiga, para oligark-predatoris pola pendekatan yang digunakan adalah menggunakan institusi kekuasaan dan birokrasi pemerintah. Perpaduan ketiga pola itu kemudian membentuk kontinuitas pola warisan Orde Baru dan berkolaborasi dalam jaringan bisnis dan politik.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai salah satu arena ditengah kontestasi demokrasi yang berbiaya mahal, telah mengundang intervensi modal atau kelompok bisnis, baik sebagai kandidat atau sebagai donator politik (Political broker). Kandidat yang terpilih akan memberikan konsesi politik dan ekonomi sebagai politik balas jasa melalui pemberian proyek-proyek infrastruktur, proteksi kebijakan, dan lesensi penguasaan sumber daya alam (Aspinall dan Uhaib,. 2013 dan 2014, Hidayat, 2006).

Mengamati dinamika politik lokal bulan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, baik sebelum dan setelah Pilkada, bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, justru tidak memberikan kontribusi signifikan bagi membangun ekonomi dan infrastruktur lainnya bila dibandingkan kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan-lahan warga lokal.

Pembajakan sumber daya alam oleh para oligark bisnis salah satu dampak dari keterlibatan pengusaha dalam kontestasi demokrasi dan sumber daya alam menjadi instrumen persekongkolan bisnis dan politik.

Di tengah kapitalisasi demokrasi atau pasar gelap demokrasi, keterlibatan sejumlah pengusaha tambang yang mengatur irama permainan politik lokal, semakin menjadikan pasar demokrasi bernilai mahal dan pragmatis. Oleh karena itu, pasca Pilkada para oligark-predatoris tambang mereposisi diri masuk dalam lingkaran patronase penguasa yang terpilih dalam Pilkada dan menyandera kekuasaan.

Semoga refleksi pemikiran ini menjadi medan lagi para akademik bagaimana menggunakan perspektif ini dalam membaca dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan dalam kontestasi elektoral 2020 ini.[]

15.

KAMI Kassel Dideklarasikan di Siring 0 Km

DEKLARASI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh sejumlah intelektual publik, aktivis hingga jendral pensiunan TNI seperti Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Said Didu, Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantio, MS Ka'ban dan ratusan deklarator lainnya juga diikuti berbagai daerah termasuk di Kassel .

Deklarator KAMI Kassel dikomando Muhammad Uhaib As'ad, Akhmad Husaini dan Muhammad Med dan dari kalangan aktivis serta advokat LSM lainnya.

Ahmad Husaini mengatakan KAMI hadir sebagai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan Indonesia, karena selama ini terkesan salah urus dan melenceng dari tujuan dasar bernegara.

“Penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,” ucap Husaini saat Deklarasi di Siring Km 0 Jalan Jendral Sudirman Banjarmasin, Selasa (18/8/2020) siang.

Sekjen KAMI Kalsel ini menegaskan pembangunan Indonesia dinilai gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tolak ukur, sebut Husaini jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa, terlebih Pandemi Covid-19 semakin memperdalam jurang kemiskinan.

Muhammad Med mengatakan Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut marut yang semakin sulit untuk diurai, politisikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.

“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” tegasnya.

Muhammad menjelaskan partai politik dan lembaga persalinan rakyat lebih hadir sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha, alih-alih sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan bernegara.

Senada, Presidium KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As'ad menyebut demokrasi saat ini hanya sebatas demokrasi prosedural yang mengabdikan terhadap kepentingan oligarki ekonomi.

“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.

Imbasnya, kata Uhaib kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir elit, rakyat hanya sebagian remah-remah roti.

“KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanah UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi Pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat,” ujar doktor jebolan UB ini.

Dia menjelaskan penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.

“Kami menuntut presiden dan kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” tutup Uhaib.[]

16.

Pakar Politik Kalsel Ingatkan Bahaya Pasar Gelap Demokrasi Jelang Pilkada

PENGAMAT politik dan kebijakan publik dari FISIP Uniska MAB, DR Muhammad Uhaib As'ad mengatakan dinamika politik di Kalsel tahun depan akan semakin lincah. Ia mengingatkan, gelaran demokrasi ini jangan sampai berubah menjadi arena pasar gelap yang dikontrol penguasa kapital.

Disebutkannya, akan ada tujuh kabupaten/kota yang memilih kepala daerah, sekaligus pemilihan gubernur. “Di sini nantinya dikhawatirkan akan ada arena pasar gelap demokrasi yang digerakkan penguasa kapital menjadi kontestasi yang syarat politik uang,” ujarnya mewanti-wanti, Rabu (30/10/2019).

Ia pun menyebut adanya kemungkinan para “bos-bos lokal” yang punya kepentingan secara politik dan ekonomimenjadikan seseorangpenguasa daerah dengan harapan tertentu. Sepertu pertukaran kepentingan bagi kedua belah pihak. Sehingga akan terjadi relasi antara penguasa dan pengusaha untuk menguasai sumber-sumber ekonomi negara. “menguasai sumber politik untuk kepentingan kekuasaan,” ucapnya.

Selain itu pragmatisme masyarakat dianggapnya menjadi penentu kemenangan seseorang dengan cara bagi-bagi uang. Bahkan ia mengklain, menurut survei di Banjarmasin 64 persen pemilih memilih karena politik uang.

“Hal inilah yang menjadi persoalan demokrasi kita, bagaimana kontestasi politik lokal di Kalsel 2020 agar diminimalisir, dikurangi lah praktek-praktek politik uang,” tegasnya.

“Bukan sekadar menampilkan demokrasi prose-dural atau demokrasi formalistik tetapi kita harus jauh melangkah belajar menciptakan kualitas demokrasi substantif,” harapnya.[]

17.

Regional Elections Held Hostage By Capitalists: Political Observer

KALIMANTAN Islamic University (Uniska) political observer Muhammad Uhaib As'ad says that the democratic process in Indonesia post *reformasi* – the political reform process that began in 1998 – is still being held hostage by the power of money.

The consequence of this is that regional heads being elected in regional elections (Pilkada) are simply assistants (pembantu) or “errand boys” (kacung) for the oligarchy at the both the local and national level.

As'ad said that it is quite possible that the regional heads elected in the upcoming 2020 simultaneous regional elections will have the same character.

“Actually, the regional heads elected in these *Pilkada*, actually they’re just puppets, errand boys, who are controlled by the local or national oligarchy”, said As’ad during a webinar held by the National Human Rights Commission (Komnas HAM) on Wednesday July 29.

According to As’ad, the high cost for candidates to take part in elections is one of the indicators that democracy is being held hostage by the power of capital.

With these high costs, he said, only people or institutions with the power of big capital can take part in elections. Democracy does not permeate down to the grass roots so that anyone can nominate themselves even though they are not supported by the power of money.

This situation has provided space for the power of the oligarchy to co-opt democracy in Indonesia. “Because they have the power of big capital”, said As’ad.

Those who have money then try to buy votes with their money.

“These capitalists don’t become candidates, but they can regulate the rhythm of local political contests. Just like the owner of an 11 person soccer team. They don’t need to be a player, but they buy the world’s top players, they pay and they plan to become a big power”, he said.

The dependency of candidates on sources of finance from a handful of people in the oligarchy flows on to the policies that they enact after being elected.

As'ad said that with this dependency, elected regional heads almost certainly do not side with the ordinary people. Regional heads, he said, clearly side with the interests of the oligarchy as reciprocation for the money spend during regional elections.

He gave as an example regions that are rich in natural resources. In these areas, there are many regional heads who give out mining concessions to business tycoons.

As'ad suspects that these business people get the mining concessions because they sponsored the election campaign of the regional heads.

“They [regional heads] become like the title of the song ‘half my soul is gone’. Yes because they’re dictated to so that the policies they enact side with the interests of groups that were the wheelers and dealers in the *Pilkada*”, said As'ad.

This situation is slowly eroding the bargaining power of the government and the state in the face of the oligarchy. The government's status is slowly changing from being the power holder and a servant of the ordinary people to becoming a “client” of businesspeople.

Conversely, the oligarchy in the regional has now become the power holders because they can control the government. “The state has now changed into a client, not a patron. The state is held hostage by the political power of capitalists”, he said.[]

18.

Jejak Demokrasi Menggerogoti Negeri

INDONESIA merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi di dunia. Menurut Abraham Lincoln demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini rakyat diizinkan untuk memilih langsung perwakilan mereka dalam membentuk badan pemerintahan.

Salah satu praktek demokrasi yakni adanya pemilu dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di pusat dan daerah. Dalam pemilu ini rakyat punya hak memilih siapa saja calon yang mereka anggap mampu untuk memimpin dan mewakili suara mereka.

Hanya saja pada prakteknya pelaksanaan pemilu ini telah jauh melenceng dari hakikat sebenarnya. Banyak fakta menunjukkan bahwa sistem pemilu ini hanyalah sebagai ajang jual beli suara rakyat.

Dikutip dari laman www.mediaindonesia.com (3/7/2020) diberitakan bahwa praktik oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor bagi para kandidat. Akibatnya, calon yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan kelompok elite dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin dalam satu webinar di Jakarta.

Lebih lanjut, kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah membuat praktik oligarki kian menguat. Calon bupati dan wali kota membutuhkan Rp20 miliar-Rp30 miliar untuk bisa ikut dalam pemilu. Biaya tersebut untuk beli perahu partai, konsolidasi, dan kemenangan.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad, mengungkapkan bahwa praktik oligarki terjadi di

banyak wilayah di Indonesia. “para pengusaha izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal.” Hal ini tak ayal menimbulkan korporatokrasi, yakni perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha.

Demokrasi Kian Menggerogoti Negeri

Fakta diatas merupakan gambaran rapuhnya pelaksanaan sistem demokrasi saat ini. Secara lahirnya memang sistem ini mudah sekali jatuh karena aturannya hasil buatan manusia. Semua produk hukumnya adalah hasil karya akal manusia. Sebaliknya aturan Allah sebagai pencipta langit dan bumi tak dipakai dalam sistem ini. Padahal kita tahu bahwa aturan yang dibuat manusia tak akan mampu ciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Apalagi sistem ini lahir dari ideologi kapitalisme yang berhamba pada materi dan keuntungan.

Memang kapitalisme memakai azas manfaat, semua hal akan dilakukan asalkan ada untungnya. Tak peduli itu melanggar HAM ataupun mereka langgar norma agama. Proses pemilu adalah bukti nyata berlakunya azas manfaat ini. Pemilik modal akan memberikan subsidi bagi para calon dalam kontestasi politik. Kelak jika calon tersebut berhasil lolos menjadi pejabat, tentu akan ada balas jasa dari subsidi yang diterima.

Ditambah lagi, praktek balas budi ini akan berlanjutan pada taraf pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelak akan lahir sejumlah aturan yang justru akan menguntungkan para pengusaha, sementara kepentingan rakyat yang memilihnya disingkirkan. Telah banyak aturan dan kebijakan yang lahir yang memihak para pengusaha. Alhasil, para pemilik modal leluasa mengeruk kekayaan negeri ini. Sementara rakyat yang telah memilihnya saat pemilu dibiarkan hidup sengsara. Inilah praktek yang melanggar HAM demi kepuasan nafsu penguasa dan pengusaha tadi.

Hingga kini cukup banyak praktik demokrasi yang kian membahayakan negeri. Ibarat bibit penyakit, praktik tersebut kian hari bertambah parah. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan demokrasi yang menggerogoti negeri :

Pertama, demokrasi sangat dekat dengan money politics. Sudah jadi rahasia umum bahwa tiap pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan pemilihan kepala desa pun tak luput dari aktifitas ini. Hingga terjadi jual beli suara, ketika terpilih bukan melayani kebutuhan rakyat. Tapi mengurus cara mengembalikan modal yang keluar saat pemilu.

Kedua, akibat dari money politics tadi, tak sedikit kepala daerah dan anggota legislatif yang tersandung

kasus korupsi. Kita melihat korupsi telah merajalela dalam setiap sendi kehidupan. Sepertinya praktik ini sulit dihapuskan, karena masyarakat telah dibiasakan dengan aneka saweran untuk memuluskan suatu urusan.

Ketiga demokrasi menyuburkan praktik oligarki. Oligarki berasal dari bahasa Yunani, oligon sedikit dan arkho memerintah. Artinya pucuk kepemimpinan hanya dikuasai oleh kalangan elit dan berduit. Akibat mahalnya biaya demokrasi, yang bisa mencalonkan diri dalam perhelatan demokrasi (pemilu) hanyalah yang punya modal besar. Tak ayal, banyak anak pejabat yang ikut pencalonan kepala daerah, karena mereka punya modal dan kekuasaan. Tentu yang tak punya modal besar, bersiap saja untuk kalah dalam pemilihan.

Keempat, demokrasi lahirkan sistem birokrasi yang yang bercampur politics (birokrasi politics). Semua urusan ditimbang dari segi untung dan rugi terhadap pemungutan suara. Pendukung dan simpatisan parpol yang berkuasa saat itu akan dimudahkan urusannya. Yang bukan pendukung justru sebaliknya.

Kelima, demokrasi lahirkan para buzzer politics untuk membuat opini mendukung pihak penguasa. Segala media dioptimalkan demi mencapai tujuan politiknya. Pemutar balikan fakta kerap terjadi, yang

benar jadi salah. Yang salah maka sebaliknya, dianggap kebenaran. Telah kita lihat saat ini, banyak terjadi pembungkapan terhadap penyeru kebaikan. Persekusi terhadap pembela kebenaran semakin nyata didepan mata.

Jika praktek demokrasi diatas masih berlaku di negeri ini, maka bersiaplah menghadapi kehancuran. Untuk itu kita harus mencari obatnya jika masih cinta dengan negeri ini. Satu-satunya jalan yakni kembali pada pada ajaran islam.

Ajaran Islam, Kalahkan Demokrasi

Sistem demokrasi telah menyalahi aturan islam sebab menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dimuka bumi. Sejatinya manusia tak perlu membuat hukum sendiri, karena semua hukum terkait kehidupan manusia sudah Allah jelaskan dalam Alquran dan hadist nabi.

Maka, tak salahnya jika kita kembali pada aturan sang pencipta jagad raya ini. Sebuah aturan yang dulunya telah mengantarkan islam menjadi pusat peradaban dunia. Bukan hanya sebentar, tapi mampu bertahan hingga 1300 tahun lamanya. Maka dari itu, cukuplah aturan Allah saja yang diterapkan dimuka bumi, jika ingin kesejahteraan dan kemakmuran bagi negeri ini. Wallahu alam bisshowab.[]

19.

Kutukan Demokrasi dan Politisasi Kebencian

HIRUK-pikuk jagat perpolitikan nasional di tengah turbulensi politik yang sarat caci maki dalam pertarungan perebutan opini publik sudah sampai pada titik nadir kutukan demokrasi yang membahayakan. Kutukan demokrasi itu hadir di tengah pertempuran memperebutkan wacana publik (*public discourse*) di saat medan tempur yang sarat kebencian dan memuakkan itu.

Alih-alih para aktor dan para oligarki mengedepankan keadaban berpolitik, justru lebih mempertontonkan banalitas politik dan kedunguan di tengah fragmentasi politik publik yang semakin liar. Di tengah banalitas dan keliaran politik, massa rakyat tidak bisa lagi dimobilisasi dan didikte seenaknya menurut kehendak para elite

politik yang sedang merebut simpatik suara publik.

Pragmatisme politik membuat nilai suara publik saat ini nyaris tidak lagi sebagai refleksi yang menggambarakan rasional politik. Yang terjadi justru terbangun rasionalitas palsu di tengah absurditas perebutan panggung politik.

Pesta sedakah suara publik pada 17 April 2019 mendatang, publik pun tidak peduli bahwa suara itu mau jadi apa dan kemana akhir ceritanya. Yang hadir dalam imajinasi sosiologi publik bahwa inilah yang disebut pesta demokrasi yang menghabiskan puluhan triliun duit negara.

Apatisme dan pragmatisme politik yang terstruktur dalam imajinasi politik publik, sesungguhnya sebuah bentuk kegagalan dalam membangun kecerdasan berdemokrasi setelah sekian lama negeri ini berada dalam sangkar demokrasi otoriter Orde Baru.

Di tengah transisi demokrasi saat ini, panggung institusi kekuasaan semakin menarik diperebutkan para politisi yang memiliki kekuatan modal. Panggung demokrasi tersandera oleh kuasa modal karena faktanya hanya orang-orang yang memiliki modal besar yang berpeluang menguasai panggung demokrasi. Inilah yang disebut kutukan demokrasi (*democracy curse*) yang menjelma di tengah dahsyatnya turbulensi politik.

Pertanyaannya adalah, mengapa kutukan demokrasi itu hadir? Mengapa politisasi kebencian dalam memperebutkan opini publik itu menjadi iklan yang menarik? Memproduksi kebencian dalam dunia politik bagi sebagian orang mungkin dianggap hal yang biasa saja dan bahkan perlu dalam rivalitas kekuasaan. Pemandangan seperti ini telah hadir dan menjadi tontonan sehari-hari bagi rakyat di negeri ini. Rakyat pun menjadi penikmat setia dari perdebatan-perdebatan politik itu.

Bahkan bisa menjadi hiburan yang menarik. Di warung kopi dan kerumunan rakyat, narasi-narasi politik keluar dari mulut mereka dengan bangunan argumentasi rasional.

Mengapa mendukung Jokowi dan kenapa tidak mendukung Prabowo, atau sebaliknya? Publik punya nalar politik sendiri yang lahir secara natural sebagai hasil interaksi keseharian para komunitas-komunitas (pedagang asongan, abang becak, dan anak-anak jalanan) yang nyaris tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah didik oleh partai-partai politik yang ada.

Ya, kontruksi sosial atau imaginasi sosio-politik itu lahir secara natural karena partai politik tidak pernah memperlakukan massa rakyat sebagai bagian dan kontruksi demokrasi. Absurditas kontruksi demokrasi

itu baru hadir di saat merindukan suara rakyat untuk kepentingan caleg, pilbup, pilgub, dan pilpres saja.

Dalam sejarah Indonesia modern seperti ditulis Ben Anderson, kekuatan rakyat selalu dihadirkan manakalah negara itu memerlukan dukungan politik atau semangat nasionalisme rakyat dan setelah itu rakyat ditinggal pergi.

Selanjutnya, para demagog penguasa akan berpesta pora dalam sangkar kekuasaannya. Tidak aneh, bila sinisme publik muncul ketika para demagog menyampaikan titah-titah politiknya di ruang publik. Perebutan ruang publik telah penuh sesak dengan dengan bungkus janji-janji politik. Janji-janji politik telah memuakan nurani publik.

Nurani publik sudah terasah, mana narasi omong kosong dan mana pembual. Alih-alih mewakili kepentingan publik, partai politik telah menjadi kartel, arena pesekongkolan para demagog yang haus kuasa. Partai politik yang sejatinya menjadi instrumen demokrasi justru mereduksi substansi demokrasi menjadi kutukan di negeri ini. Tengok saja, berapa banyak elite partai terjerat kasus hukum dan menjadikan partai menjadi kuda tunggangan sekadar berebut kuasa dan ekononi. []

20.

Dr. Uhaib Digandeng 2 Profesor Luar Negeri Lakukan Penelitian

PROFESOR Marcuse Meiztner dan Profesor Meredith L Weiss yang berasal dari Negara Australia dan Amerika turut mengajak akademisi lokal Dr Uhaib As'ad M.Si dalam melakukan penelitian kebijakan publik di berbagai Negara belahan dunia.

Peneliti yang juga kerap dikenal sebagai pengamat kebijakan Publik Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska MAAB) ini diajak sebagai asisten peneliti oleh kedua profesor kenamaan dari luar negeri tersebut.

Dr Uhaib mengatakan sebuah kehormatan baginya bisa menjadi asisten peneliti, kesempatan itu akan digunakannya untuk belajar lebih dalam mengenai teori kebijakan, sosial dan politik dari dua Profesor Australia

dan Amerika.

“Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi asisten dari dua Profesor ini,” ucapnya.

“Saya akan belajar mengenai teori kebijakan sosial dan politik dari mereka untuk mempertajam dan mendalami ilmu ini,” Uhaib melanjutkan.

Menurutnya di Indonesia sendiri akan dilakukan penelitian mengenai perkembangan demokrasi pasca orde baru bersama kedua peneliti itu.

Sementara itu, Uhaib pun sudah melakukan komunikasi dan bertemu langsung dengan kedua profesor tersebut di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 25 November kemaren.

“Kemaren di Malang sudah menjalani agenda komunikasi, dan sekali lagi saya sangat bersyukur atas kesempatan ini,” singkatnya. []

21.

Pilkada Pestanya para Pemilik Modal dan Oligarki

PENGAMAT Sosial Politik DR Uhaib As'ad Mene-gaskan Demokrasi Di Indonesia Berjalan Mundur, dan Pilkada adalah Pestanya Para Pemilik Modal Serta Para Oligarki, Kamis (3/9/2020).

Penulis buku berjudul “Demokrasi dan Predator Negara” Doktor Uhaib As'ad menyampaikan keprihatinannya atas jalannya demokrasi di Indonesia. Menurutnya, politik di Indonesia saat ini berjalan mundur, bahkan munculnya oligarki di daerah, dan inilah yang ia bahas dalam bukunya tersebut.

Menurutnya, pasca tumbanganya rezim orde baru dan lahirnya reformasi banyak harapan agar berjalannya demokrasi yang lebih baik. Misalnya, bagaimana otonomi daerah dan desentralisasi.

Tetapi, kata Uhaib, setelah reformasi berjalan sekitar 22 tahun, jalannya demokrasi menjadi tidak jelas dan berjalan kearah yang mundur. Hal itu terlihat dengan menguatnya politik oligarki dan dinasti di daerah, serta penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh kepala daerah, politisi, dan parpol.

Hal tersebut, ungkapnya tidak sesuai dengan harapan ketika awal-awal berjalannya reformasi.

“Politik di Indonesia itu sekarang ini bukan berjalan maju, tetapi demokrasi yang berjalan mundur atau back sliding democracy,” tegas Penulis Buku Demokrasi dan Predator Negara ini.[]

22.

Demokrasi Setan Masih Kuasai Pilkada Tanah Bumbu 2020

PAKAR politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, M Uhaib Asad, mengatakan relasi bisnis dan kuasa masih mewarnai pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2020.

Apalagi di Tanah Bumbu, Uhaib menilai kekayaan tambang batu bara masih dikuasai segelintir pengusaha lokal kelas kakap. Penguasaan sumber ekonomi macam ini membuat bandul politik lokal disetir oleh segelintir pengusaha yang punya kepentingan bisnis di wilayah setempat.

Menurut dia, pola macam ini bukan rahasia umum lagi. Uhaif berkata ada segelintir orang yang memiliki

pengaruh politik, namun tidak punya kepentingan menjadi wali kota, bupati atau gubernur.

“Tetapi punya kepentingan terkait perizinan tambang dan SDA. Bos-bos lokal ini yang sangat berperan aktif dalam kekuasaan politik atau politik dalam lingkaran pengusaha,” ucapnya kepada wartawan **banjarhits.id**, Rabu (21/8).

Alhasil, Uhaib melihat pola suksesi politik lokal di Tanah Bumbu pada Pilkada 2020 masih sama dengan kontestasi pilkada tahun sebelumnya. Menurut dia, bos-bos ini yang sangat berperan yang mengendalikan ritme politik di Tanah Bumbu.

“Dimana para pasangan calon yang dimenangkan oleh salah seorang pengusaha nanti dituntut untuk balas budi kepada pengusaha agar keinginan dari pengusaha ini tercapai,” terang Uhaib.

Ia berkata Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Balangan, Tabalong, Banjar dan Tapin dikenal sumber tambang batu bara. Menurut dia, semua kabupaten ini punya *landscap* yang menggiurkan bagi para penjudi politik untuk menguasai politik lokal.

Para penguasa lokal akan mengikutkan para pengusaha menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penguasa pemerintahan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Inilah lingkaran demokrasi setan yang terjadi di negeri ini. Lokal politik di wilayah ini sudah dikuasai oleh penguasa tambang, sangat sulit melepaskan diri sebagai penguasa yang tidak dibayang-bayangi oleh para pengusaha. Oleh karena itu, sangat tidak memberi harapan yang baik untuk kecerdasan politik ke depan, kalau kekuasaan itu bisa dibeli dengan uang,” bebarnya.

Solusi atas permasalahan klasik ini lewat pendidikan politik yang harus diberi kepada masyarakat oleh setiap instansi dan stakeholder yang terkait termasuk partai politik yang seyogyanya bertugas memberikan pendidikan politik yang baik.

“Bukan sebaliknya menjadi kendaraan bagi para penguasa untuk menjalankan *money politic* maupun politik pragmatis yang akhir-akhir ini berkembang di negeri ini,” tutupnya.[]

23.

Politik Dinasti di Pilkada Merisaukan

SOEHARTO tumbang, demokrasi tumbuh. Namun, politik dinasti pun turut subur sebagai parasit di dalamnya. Apalagi setelah era pemilihan kepala daerah langsung. Terdapat keluarga yang anggotanya menggunakan kekuatan politik formal selama lebih dari satu generasi.

Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As'ad, mengutip Buehler (2013), menulis formasi politik dinasti sebagai “keluarga yang berhasil bertahan dalam dua siklus pemilihan eksekutif” dengan banyak “mencoba memperluas basis mereka untuk memasukkan pos legislatif di berbagai tingkat pemerintahan”, untuk menambah jabatan eksekutif pemerintah yang mereka dominasi.

Di Asia, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia. Ada klan Aquino di Filipina, Korea Selatan punya klan Park, dan di Korea Utara ada dinasti Kim.

Politik Dinasti pada Pilkada 2017

Langgengnya praktik politik dinasti pada tiap pilkada juga didukung peluang kemenangan lebih tinggi ketimbang pasangan kandidat lainnya.

Persentase kemenangan kandidat dari dinasti politik pun relatif besar. Pada Pilkada 2017, kandidat dinastikal yang menang pilkada setidaknya meraih suara 44 persen. Padahal, mereka hanya perlu lebih dari 30 persen suara untuk menang.

Andika Hazrumy, yang tak lain anak dari Atut Choisyah, berhasil menjadi Wakil Gubernur Banten setelah bertarung melawan Rano Karno-Embay Mulya Syarif dengan perolehan 50,93 persen suara. Atut adalah bekas Gubernur Banten dan terpidana kasus korupsi. Keluarganya selama satu dekade menjadi dinasti politik yang kuat di Banten. Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut, menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan Bupati Serang (2016-2021). Selain itu, Airin Rachmi Diany, ipar Atut, menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021).

Pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala, pemenangnya adalah pasangan keluarga Noormilyani—yang merupakan istri dari bupati sebelumnya, Hasanuddin Murad—dengan keponakannya Rahmadian Noor. Pasangan ini berhasil meraih 48,76 persen suara.

Politik Dinasti Pilkada 2018

Pada Pilkada 2018 ini, ada lima daerah yang kembali memiliki calon yang berasal dari dinasti politik, yaitu Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Ada 13 calon berasal dari politik dinasti dan delapan di antaranya mengikuti pemilihan tingkat provinsi.

Calon tersebut antara lain Dodi Reza Alex Noerdin, Giri Ramanda Kiemas, Asrun, Sitti Rohmi Djalilah, Ichsan Yasin Limpo, Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba, Karolin Margret Natasa dan M Ridho Suganda.

Sumatera Selatan

Pasangan calon pada pilkada Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda Kiemas, sama-sama mempunyai kerabat dengan jabatan yang kuat pada politik Sumatera Selatan. Dodi adalah putra dari gubernur petahana Alex Noerdin yang telah menjabat sejak 2008. Sebelumnya, Alex Noerdin sendiri adalah Bupati Musi Banyuasin periode 2002-2008.

Di sisi lain, Giri adalah putra dari Nazarudin Kiemas, mantan anggota DPR Dapil Sumatera Selatan periode 2004-2014. Nazarudin Kiemas adalah adik kandung Taufiq Kiemas, Ketua MPR periode 2009-2013 dan merupakan suami Megawati Soekarnoputri. Kedua calon mendapat dukungan dari Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB.

Sulawesi Tenggara

Di Sulawesi Tenggara, jabatan politik yang dimiliki oleh keluarga calon gubernur Asrun begitu mengakar. Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode (2007-2017) dan jabatan-jabatan politik di Pemerintah Kota Kendari diduduki oleh anggota keluarganya. Istri Asrun, Sri Yastin, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang). Jawatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang) dijabat oleh Hasria Mahmud yang merupakan adik Asrun.

Askar Mahmud, adik Asrun lainnya, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013. Putra Asrun pun ikut mengisi jabatan politik sebagai Wali Kota Kendari saat ini, yaitu Adriatma Dwi Putra. Sedangkan Asrizal Pratama Putra, anak Asrun lainnya, menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Tahun berikutnya, Surunuddin Dangga

yang merupakan paman Asrun menjadi Bupati Konawe Selatan.

Nusa Tenggara Barat

Di Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, maju sebagai cawagub 2018. Menariknya, Sitti adalah satu-satunya kandidat perempuan pada pertarungan ini. Salah satu indikasi Demokrat dan PKS berani memberikan dukungan kepada Sitti adalah karena keluarga Sitti memiliki latar belakang politik yang cukup kuat. Zainul Madji, adik dari Sitti, adalah Gubernur NTB dua periode.

Adiknya yang lain, Syamsul Luthfi, menjabat sebagai anggota DPR Dapil NTB (2014-sekarang). Lainnya, Khaerul Rizal, suami dari Sitti, adalah Ketua DPRD Lombok Timur (2014-sekarang). Tak hanya itu, Sitti adalah cucu dari pahlawan nasional Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Maluku Utara & Kalimantan Barat

Di Maluku Utara, kakak-beradik Kasuba maju memperebutkan kursi gubernur. Dibandingkan sang adik, Abdul Gani lebih memiliki pengalaman dalam kontestasi politik. Ia merupakan gubernur petahana dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Sementara itu, Muhammad merupakan

mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode. Jabatan tersebut digantikan oleh keponakannya, Bahrain Kasuba.

Di Kalimantan Barat, Karolin Marget Natasa, Bupati Landak yang baru saja menjabat tahun lalu, adalah putri dari Cornelis. Cornelis adalah gubernur petahana sejak 2008. Sebelumnya, Cornelis pun pernah menjabat sebagai Bupati Landak selama dua periode. Keluarga Cornelis adalah kerabat dari Panglima Sidong, tokoh masyarakat di Sanggau.

Sulawesi Selatan

Dinasti lainnya yang juga menjadi pemain kuat di daerah adalah Keluarga Limpo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ichsan adalah putra dari Yasin Daeng Limpo yang merupakan salah satu pendiri Golkar dan tokoh di Sulawesi Selatan. Ibu Ichsan, Nurhayati Yasin Limpo juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1987-1999.

Kakak dan adik Ichsan juga memiliki jabatan politik di Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo, kakak dari Ichsan, adalah gubernur petahana dua periode. Tenri Olle Yasin Limpo adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Gowa dan Tenri Angka Yasin Limpo adalah mantan anggota DPRD Makassar.

Kakak perempuan Ichsan, Dewi Yasin Limpo, yang telah dijatuhi vonis penjara karena kasus suap proyek pembangkit listrik, adalah mantan anggota DPR dari fraksi Hanura. Sementara itu, adik Ichsan, Haris Yasin Limpo, menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Putra Ichsan, Adnan Purita Ichsan, adalah Bupati Gowa saat ini. Ipar dan keponakan Ichsan juga menempati jabatan politik di Sulawesi Selatan, khususnya di kursi legislatif.

Biaya Pilkada Mahal dan Pemusatan Sumber Daya

Bila melihat jaringan kekerabatan di atas, terlihat bahwa masing-masing keluarga memiliki pengaruh politik lokal selama beberapa dekade. Tidak sedikit yang kerabatnya memiliki jabatan politik selama dua periode, baik di tingkat eksekutif ataupun legislatif.

Karena menjabat dalam waktu lama, mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Keluarga Limpo misalnya, dalam penelitian Dirk Tomsa *Party Politics and Democratization in Indonesia*, dikenal memiliki banyak uang, banyak pengikut, dan banyak pengikut setia. Contoh lain adalah keluarga Karolin dan Sitti Rohmi yang merupakan kerabat dari tokoh masyarakat di daerahnya.

Di sisi lain, biaya pilkada begitu mahal. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Ketua Umum Partai

Gerindra, pernah menyebut biaya yang dibutuhkan dalam pertandingan elektoral gubernur adalah Rp300 miliar. Itu pun «paket hemat».

Kandidat dengan sokongan politik dinasti punya kekuatan karena pemimpin daerah punya akses terhadap penguasaan sumber daya. Gejala ini juga didukung lemahnya sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Tak jarang terjadi praktik korupsi pada politik dinasti. Contohnya adalah yang terjadi pada (keluarga) Atut Chosiyah di Banten.

Pada konteks yang lebih luas, kecenderungan dinasti politik tidak hanya muncul dalam pilkada. Organisasi kepartaian di Indonesia tidak bebas dari isu yang sama.

Marcus Mietzner (2016) dalam "The Sukarno Dynasty in Indonesia" memberi contoh bagaimana persona dan kharisma Sukarno menjadi figur politik yang sentral, baik untuk membangun ataupun melakukan regenerasi. Pada satu sisi, kekuatan imaji atas figur tersebut membantu kekuatan politik partai terutama dalam mengumpulkan suara elektoral. Di sisi lain, melalui persona dan kharisma yang sama, organisasi partai politik memiliki potensi krisis dalam melakukan regenerasi kepemimpinan.

Hal sama terjadi dalam keluarga (Prabowo) Djojohadikusumo. Jemma Purdey (2016) dalam "Narratives to power: The Case of the Djojohadikusumo Family Dynasty Over Four Generations" menunjukkan bagaimana sosok keluarga tersebut berpengaruh kuat dalam membangun basis organisasi partai politik.

Secara lebih luas, kita juga bisa merujuk paparan James C. Scott (2014) mengenai "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" ihwal bagaimana ikatan patron-klien ala dinasti politik lokal tumbuh subur di Asia Tenggara. Tidak saja menjadi satu karakter kultural, model ikatan sosial itu mencoba bertransformasi dan mempertahankan diri mengikuti perubahan sosial. Termasuk dalam mekanisme baru, yakni politik elektoral atau pilkada.

Masalah politik dinasti dalam pilkada ini juga sempat dibatasi Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa calon «tidak memiliki konflik kepentingan», antara lain tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana (ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu).

Sayang, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak konstitusional.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini pernah mengatakan bahwa dinasti politik di Indonesia adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaan.

“Dinasti politik di Indonesia dan kaitannya dengan korupsi, agak signifikan, kalau tidak bisa dikatakan relatif signifikan, kaitannya dengan korupsi. Karena memang karakter dinasti politik di Indonesia, dia hadir dengan mengabaikan integritas, kompetensi, dan kapasitas, ketika mereka dinominasikan untuk merebut suatu kekuasaan atau sebuah posisi publik,” kata Titi.

Alhasil, mereka yang diajukan sebagai calon kepala daerah dari dinasti politik, menurut Titi, tak melalui proses kaderisasi, rekrutmen yang demokratis, atau proses penempatan aktivitas politik yang terencana, sehingga kandidat yang muncul pun sekadar `untuk memperkokoh kekuasaan`.

Larangan keluarga inkumben mencalonkan diri sebenarnya pernah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 7 huruf r. Namun Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menghapus pasal tersebut dalam perkara uji materi pada tahun yang sama.

Merisaukan

Sebelumnya Djohermansyah Djohan, pakar otonomi daerah, merisaukan keberadaan politik dinasti di berbagai daerah di negeri ini. Maklum, menurutnya, para kepala daerah yang terindikasi mempunyai kedekatan dengan mantan petahana, mereka cenderung menyalahgunakan wewenang, jabatan dan korup.

“Jelas merisaukan jika bertambah banyak,” kata mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga pernah mengemban posisi Pejabat Gubernur Riau tersebut. Berikut wawancara *tirto.id* dengan mantan penasihat media KPU ini.

Apakah ada politik dinasti di negeri ini?

Politik dinasti dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berkembang biak di pemda-pemda (pemerintahan daerah). Data tahun lalu (2015) saja, sebelum digelar Pilkada serentak, politik dinasti ada di 61 kepala daerah. Ini berarti 11 persen dari total daerah yang ada.

Jelas merisaukan jika bertambah banyak. Ada kecenderungan karena garis keturunan, darah, atau hubungan perkawinan. Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada

praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat. Sebaiknya dibatasi.

Bagaimana cara membatasinya, sementara upaya judicial review terhadap pasal 7 UU Nomor 8 tahun 2015 dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK)?

Memang. Tadinya kalau ada petahana yang kerabatnya maju (Pilkada) untuk menggantikan posisinya, dilarang UU dan harus jeda satu periode. Tapi UU-nya kemudian digugat dan akhirnya dibolehkan MK. Akibatnya di Ogan Ilir bermasalah. Itu baru soal narkoba. Belum nanti berlanjut ke soal korupsi dan lain-lain. Misalnya penyalahgunaan wewenang.

Mengangkat pejabat masih dari kalangan keluarga itu berbahaya. Sehingga kita usulkan dalam revisi UU Pilkada, agar diatur lagi soal pembatasan. Bukan larangan lho ya. Presiden saja dibatasi. Gubernur juga dibatasi. Jadi mereka (kepala daerah) juga harus dibatasi.

Menurut Anda, politik dinasti mana yang mengakar di negeri ini?

Di daerah yang punya *track record* buruk. Banten misalnya, adiknya, anaknya, menantunya, semua main di kepala daerah.

Jadi Anda tidak mendukung keputusan MK menganulir pasal 7 UU 8/2015?

Dari dulu saya keberatan. Kekeabatan kepala daerah sebenarnya bertentangan dengan UU dan UUD. MK hanya melihat dari konteks manusianya.

Bagaimana seandainya kandidat yang punya hubungan kekeabatan dengan petahana ternyata punya kemampuan?

Dan ternyata perpolitikan di Indonesia tidak begitu. Apa mereka punya kemampuan?

Adakah cara lain mengikis praktik politik dinasti?

Cara lain ya direvisi UU-nya. Dilakukan reformulasi. Jangan ditaruh di formula yang lama. Jangan dimasukkan di syarat, tapi di larangan dan pembatasan. Tapi sebenarnya, poin pentingnya adalah apakah mereka (DPR) setuju soal pembatasan? Kan tidak.

Apa yang terjadi di kepala daerah kita itu *ngawur*. Tidak pernah jadi dewan atau anggota partai, tiba-tiba maju jadi calon kepala daerah. Di Kediri juga aneh. Dua istri dari kepala daerah maju di Pilkada. Istri tua menang, istri muda yang lebih kaya disuruh mengalah.

Bagaimana dengan parpol yang menjadi kendaraan bagi para kandidat untuk maju?

Kan ada peraturan. Mereka harus ikut. Ketika dibatasi, ya mereka harus ikut.

Apakah Anda setuju jika disebut masyarakat belum menjadikan meritokrasi sebagai pegangan dalam memilih kepala daerah?

Iya lah. Kita kan di masyarakat yang polanya paternalis. Masih kuat hubungan kesukuan, kedaerahan, kekerabatan, dan hubungan perkawinan. Menjadi penting, seorang kandidat itu anak siapa? Keluarganya siapa? Baru dipilih. Nah, kompetensi dan integritas belum banyak dipakai di masyarakat kita.

Bagaimana agar masyarakat mulai peduli dengan meritokrasi?

Memang perlu pembelajaran yang panjang dan lama agar masyarakat melek politik. Perlu pendidikan politik panjang. Kalau tidak dilakukan, masyarakat kita tidak akan masuk ke meritokrasi.

Apakah praktik politik dinasti selalu buruk ?

Oh tidak, asalkan secara konsep bagus. Tapi di Indonesia diterapkan dengan model yang salah kaprah. Di sini lebih karena faktor kekerabatan, bukan kompetensi dan integritas.[]

24.

Oligarki Diramal Bakal Menguat dalam Pilkada 2020

BANYAKNYA calon tunggal dan majunya kerabat lingkaran Istana dinilai menjadi tanda peningkatan oligarki dalam perhelatan Pilkada 2020.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai oligarki berpotensi menguat dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, ada beberapa faktor yang mendasari penilaian potensi peningkatan oligarki dalam Pilkada 2020. Pertama, proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik makin elitis dan tertutup.

Sementara, akses masyarakat untuk ikut mengawasi proses semakin sulit, karena Pilkada 2020 digelar di

tengah suasana pandemi virus corona atau Covid-19.

“Publik disuruh jaga jarak dan sebagainya, memang bagus karena untuk kesehatan dan proteksi dari paparan Covid-19. Tapi, di sisi lain aktivitas partai makin jauh dari prosedur yang demokratis dan terbuka,” kata Titi, dalam sebuah forum diskusi virtual, Rabu (29/7).

Keberadaan calon tunggal juga dinilai menjadi faktor yang membuat oligarki menguat dalam Pilkada 2020. Titi mencatat ada 20 daerah yang punya potensi calon tunggal dalam pesta demokrasi tahun ini.

Selain itu, gejala politik dinasti juga menguat dalam Pilkada 2020. Ini dapat tergambarkan dari banyaknya kerabat dari lingkaran Istana yang maju di Pilkada 2020.

Sebagai contoh, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka bakal bertarung dalam Pilkada Solo 2020. Ada pula putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang akan melaju sebagai calon Wali Kota Tangerang Selatan.

Kemudian, anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yakni Hanindito Himawan Pramono yang maju di Pilkada Kediri 2020. Lalu, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo yang akan melaju sebagai calon wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

“Kemudian ada 224 petahana yang akan maju kembali di Pilkada 2020 dan ini disikapi dengan pragmatisme politik. Salah satu contohnya adalah politisasi program penanganan Covid-19 dan bantuan sosial,” kata Titi.

Ia pun menilai, penggunaan media digital yang bakal semakin marak saat Pilkada 2020 bisa menguatkan potensi oligarki. Pasalnya, media digital bisa mendorong hegemoni politik identitas, dan politisasi SARA ketika Pilkada 2020 berlangsung.

Menurut Titi, oligarki ini berbahaya karena bisa merusak demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. Selain itu, oligarki akan membuat kesetaraan gender dalam politik berjalan lambat.

“Ruang nominasi oleh partai itu menghambat kehadiran anak muda, dan perempuan untuk masuk ke kontestasi politik,” ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad menilai, oligarki dapat membuat tingkat korupsi di Indonesia menjadi semakin tinggi.

Sebab, pencalonan kepala daerah dalam oligarki biasanya diikuti oleh kepentingan ekonomi, yang berujung pada politik transaksional antara politisi dan pengusaha.

“Ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya yang baru-baru ini tertangkap tangan, yakni Bupati Kutai Timur di Kalimantan Timur (Ismunandar),” kata Uhaib.

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Hairansyah menilai, oligarki berpotensi menimbulkan sejumlah pelanggaran HAM. Pernyataan ini merujuk pada banyaknya laporan kasus pelanggaran HAM, yang ternyata berpangkal kepada persoalan oligarki di daerah.

“Kasus-kasus konflik agraria, sumber daya alam, lingkungan hidup, konflik-konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, dan sektor tenaga kerja banyak melibatkan pemerintah daerah di dalamnya sebagai pihak yang diadukan,” kata Hariansyah.

Oleh karena itu, ia berharap agar masalah oligarki dalam Pilkada 2020 ini bisa diatasi, dan mekanisme pemilihan politik tahun ini bisa berjalan dengan adil.[]

25.

Dosen UNISKA Sampaikan Kekecewaan Rakyat Dihadapan Ketua DPRD Kalsel

UNJUK rasa dari gabungan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Kalsel yang terpusat di kantor DPRD Kalsel, dihadiri dosen UNISKA yang turut berorasi di hadapan wakil rakyat, Senin (30/9/2019).

Kedatangan Dosen Sosial dan Politik dari UNISKA Banjarmasin, Muhammad Uhaib As'ad sontak jadi perhatian massa dan disambut tepuk tangan ratusan mahasiswa.

Orasi yang disampaikan massa juga berkaitan terkait keberatan atas RUU KUHP dan Revisi UU KPK.

“Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia,” teriak seruan demonstran menyambut kedatangan Uhaib.

Akademisi yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah ini langsung naik ke atas media jalan. Ia bergabung dengan wakil rakyat yang lebih dulu berada di lokasi konsentrasi massa, diantaranya Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan Wakil Ketua Syaripuddin.

Dalam orasinya dengan tegas Uhaib menyuarakan kekecewaan atas kebijakan pemerintah hingga terjadi kegaduhan demokrasi. Terlebih bergulirnya RUU KUHP dan Revisi UU KPK yang terjadi penolakan rakyat di setiap penjuru nusantara.

“Inilah akumulasi kekecewaan rakyat Indonesia. Kenapa rakyat marah? Antara harapan dan kenyataan, itu menjadi promblem di negeri kita ini,” cetus Uhaib.

Selain itu Uhaib juga meminta wakil rakyat benar-benar mengemban amanah dan berharap anggota DPR mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, dan menyerap serta melaksanakan aspirasi.

“Betul-betul fungsikan, fungsi anda sebagai wakil rakyat. Partai-partai politik jangan menjadi instrumen kekuasaan, tapi menjadi kekuatan menyalurkan aspirasi rakyat Kalimantan Selatan,” lanjut orasinya.

Sementara itu, kedatangan Uhaib turut membakar semangat mahasiswa dalam mengutarakan aspirasi rakyat. Ia berharap mahasiswa di Kalsel lebih mengedepankan otak dibanding otot.

“Wahai adik-adik, anak-anak ku mahasiswa dan semuanya, saya sebagai dosen meminta berdemo lah secara kualitatif dan rasional. Tunjukkan sikap intelektual anda, jaman sekarang bukan lagi adu fisik tapi adu otak, adu ide, adu konsep” tukasnya.

Pilkada 2018 Masih Sarat Politik Dinasti

Soeharto tumbang, demokrasi tumbuh. Namun, politik dinasti pun turut subur sebagai parasit di dalamnya. Apalagi setelah era pemilihan kepala daerah langsung. Terdapat keluarga yang anggotanya menggunakan kekuatan politik formal selama lebih dari satu generasi.

Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As'ad, mengutip Buehler (2013), menulis formasi politik dinasti sebagai “keluarga yang berhasil bertahan dalam dua siklus pemilihan eksekutif” dengan banyak “mencoba memperluas basis mereka untuk memasukkan pos legislatif di berbagai tingkat pemerintahan”, untuk menambah jabatan eksekutif pemerintah yang mereka dominasi.

Di Asia, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia. Ada klan Aquino di Filipina, Korea Selatan punya klan Park, dan di Korea Utara ada dinasti Kim.

Politik Dinasti pada Pilkada 2017

Langgengnya praktik politik dinasti pada tiap pilkada juga didukung peluang kemenangan lebih tinggi ketimbang pasangan kandidat lainnya.

Persentase kemenangan kandidat dari dinasti politik pun relatif besar. Pada Pilkada 2017, kandidat dinastikal yang menang pilkada setidaknya meraih suara 44 persen. Padahal, mereka hanya perlu lebih dari 30 persen suara untuk menang.

Andika Hazrumy, yang tak lain anak dari Atut Choisyah, berhasil menjadi Wakil Gubernur Banten setelah bertarung melawan Rano Karno-Embay Mulya Syarief dengan perolehan 50,93 persen suara. Atut adalah bekas Gubernur Banten dan terpidana kasus korupsi. Keluarganya selama satu dekade menjadi dinasti politik yang kuat di Banten. Ratu Tatu Chasanah, saudara Atut, menjabat Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan Bupati Serang (2016-2021). Selain itu, Airin Rachmi Diany, ipar Atut, menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (2011-2021).

Pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala, pemenangnya adalah pasangan keluarga Noormiliyani—yang merupakan istri dari bupati sebelumnya, Hasanuddin Murad—dengan keponakannya Rahmadian Noor. Pasangan ini berhasil meraih 48,76 persen suara.

Politik Dinasti Pilkada 2018

Pada Pilkada 2018 ini, ada lima daerah yang kembali memiliki calon yang berasal dari dinasti politik, yaitu Banten, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Ada 11 calon berasal dari politik dinasti dan delapan di antaranya mengikuti pemilihan tingkat provinsi.

Delapan calon tersebut adalah Dodi Reza Alex Noerdin, Giri Ramanda Kiemas, Asrun, Sitti Rohmi Djalilah, Ichsan Yasin Limpo, Abdul Gani Kasuba, Muhammad Kasuba, dan Karolin Margret Natasa.

Sumatera Selatan

Pasangan calon pada pilkada Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin dan Giri Ramanda Kiemas, sama-sama mempunyai kerabat dengan jabatan yang kuat pada politik Sumatera Selatan. Dodi adalah putra dari gubernur petahana Alex Noerdin yang telah menjabat sejak 2008. Sebelumnya, Alex Noerdin sendiri adalah Bupati Musi Banyuasin periode 2002-2008.

Di sisi lain, Giri adalah putra dari Nazarudin Kiemas, mantan anggota DPR Dapil Sumatera Selatan periode 2004-2014. Nazarudin Kiemas adalah adik kandung Taufiq Kiemas, Ketua MPR periode 2009-2013 dan merupakan suami Megawati Soekarnoputri. Kedua

calon mendapat dukungan dari Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB.

Sulawesi Tenggara

Di Sulawesi Tenggara, jabatan politik yang dimiliki oleh keluarga calon gubernur Asrun begitu mengakar. Asrun adalah Wali Kota Kendari dua periode (2007-2017) dan jabatan-jabatan politik di Pemerintah Kota Kendari diduduki oleh anggota keluarganya. Istri Asrun, Sri Yastin, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari (2017-sekarang). Jawatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Kendari (2017-sekarang) dijabat oleh Hasria Mahmud yang merupakan adik Asrun.

Askar Mahmud, adik Asrun lainnya, menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari sejak 2013. Putra Asrun pun ikut mengisi jabatan politik sebagai Wali Kota Kendari saat ini, yaitu Adriatma Dwi Putra. Sedangkan Asrizal Pratama Putra, anak Asrun lainnya, menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Kendari sejak 2015. Tahun berikutnya, Surunuddin Dangga yang merupakan paman Asrun menjadi Bupati Konawe Selatan.

Nusa Tenggara Barat

Di Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, maju sebagai cawagub 2018. Menariknya, Sitti adalah satu-satunya kandidat perempuan pada pertarungan ini. Salah satu indikasi Demokrat dan PKS berani memberikan dukungan kepada Sitti adalah karena keluarga Sitti memiliki latar belakang politik yang cukup kuat. Zainul Madji, adik dari Sitti, adalah Gubernur NTB dua periode.

Adiknya yang lain, Syamsul Luthfi, menjabat sebagai anggota DPR Dapil NTB (2014-sekarang). Lainnya, Khaerul Rizal, suami dari Sitti, adalah Ketua DPRD Lombok Timur (2014-sekarang). Tak hanya itu, Sitti adalah cucu dari pahlawan nasional Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

Maluku Utara & Kalimantan Barat

Di Maluku Utara, kakak-beradik Kasuba maju memperebutkan kursi gubernur. Dibandingkan sang adik, Abdul Gani lebih memiliki pengalaman dalam kontestasi politik. Ia merupakan gubernur petahana dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013. Sementara itu, Muhammad merupakan mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode. Jabatan tersebut digantikan oleh keponakannya,

Bahrain Kasuba.

Di Kalimantan Barat, Karolin Marget Natasa, Bupati Landak yang baru saja menjabat tahun lalu, adalah putri dari Cornelis. Cornelis adalah gubernur petahana sejak 2008. Sebelumnya, Cornelis pun pernah menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan selama dua periode. Keluarga Cornelis adalah kerabat dari Panglima Sidong, tokoh masyarakat di Sanggau.

Sulawesi Selatan

Dinasti lainnya yang juga menjadi pemain kuat di daerah adalah Keluarga Limpo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ichsan adalah putra dari Yasin Daeng Limpo yang merupakan salah satu pendiri Golkar dan tokoh di Sulawesi Selatan. Ibu Ichsan, Nurhayati Yasin Limpo juga pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan periode 1987-1999.

Kakak dan adik Ichsan juga memiliki jabatan politik di Sulawesi Selatan. Syahrul Yasin Limpo, kakak dari Ichsan, adalah gubernur petahana dua periode. Tenri Olle Yasin Limpo adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Gowa dan Tenri Angka Yasin Limpo adalah mantan anggota DPRD Makassar.

Kakak perempuan Ichsan, Dewi Yasin Limpo, yang telah dijatuhi vonis penjara karena kasus suap

proyek pembangkit listrik, adalah mantan anggota DPR dari fraksi Hanura. Sementara itu, adik Ichsan, Haris Yasin Limpo, menjadi anggota DPRD Makassar periode 2014-2019. Putra Ichsan, Adnan Purita Ichsan, adalah Bupati Gowa saat ini. Ipar dan keponakan Ichsan juga menempati jabatan politik di Sulawesi Selatan, khususnya di kursi legislatif.

Biaya Pilkada yang Mahal dan Pemusatan Sumber Daya

Bila melihat jaringan kekerabatan di atas, terlihat bahwa masing-masing keluarga memiliki pengaruh politik lokal selama beberapa dekade. Tidak sedikit yang kerabatnya memiliki jabatan politik selama dua periode, baik di tingkat eksekutif ataupun legislatif.

Karena menjabat dalam waktu lama, mereka lebih dikenal oleh masyarakat. Keluarga Limpo misalnya, dalam penelitian Dirk Tomsa *Party Politics and Democratization in Indonesia*, dikenal memiliki banyak uang, banyak pengikut, dan banyak pengikut setia. Contoh lain adalah keluarga Karolin dan Sitti Rohmi yang merupakan kerabat dari tokoh masyarakat di daerahnya.

Di sisi lain, biaya pilkada begitu mahal. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Ketua Umum Partai Gerindra, pernah menyebut biaya yang dibutuhkan

dalam pertandingan elektoral gubernur adalah Rp300 miliar. Itu pun “paket hemat”.

Kandidat dengan sokongan politik dinasti punya kekuatan karena pemimpin daerah punya akses terhadap penguasaan sumber daya. Gejala ini juga didukung lemahnya sistem *checks and balances* dalam pemerintahan. Tak jarang terjadi praktik korupsi pada politik dinasti. Contohnya adalah yang terjadi pada (keluarga) Atut Chosiyah di Banten.

Pada konteks yang lebih luas, kecenderungan dinasti politik tidak hanya muncul dalam pilkada. Organisasi kepartaian di Indonesia tidak bebas dari isu yang sama.

Marcus Mietzner (2016) dalam “The Sukarno Dynasty in Indonesia” memberi contoh bagaimana persona dan kharisma Sukarno menjadi figur politik yang sentral, baik untuk membangun ataupun melakukan regenerasi. Pada satu sisi, kekuatan imaji atas figur tersebut membantu kekuatan politik partai terutama dalam mengumpulkan suara elektoral. Di sisi lain, melalui persona dan kharisma yang sama, organisasi partai politik memiliki potensi krisis dalam melakukan regenerasi kepemimpinan.

Hal sama terjadi dalam keluarga (Prabowo) Djojohadikusumo. Jemma Purdey (2016) dalam

”Narratives to power: The Case of the Djohadikusumo Family Dynasty Over Four Generations” menunjukkan bagaimana sosok keluarga tersebut berpengaruh kuat dalam membangun basis organisasi partai politik.

Secara lebih luas, kita juga bisa merujuk paparan James C. Scott (2014) mengenai ”Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia” ihwal bagaimana ikatan patron-klien ala dinasti politik lokal tumbuh subur di Asia Tenggara. Tidak saja menjadi satu karakter kultural, model ikatan sosial itu mencoba bertransformasi dan mempertahankan diri mengikuti perubahan sosial. Termasuk dalam mekanisme baru, yakni politik elektoral atau pilkada.

Masalah politik dinasti dalam pilkada ini juga sempat dibatasi Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa calon “tidak memiliki konflik kepentingan”, antara lain tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana (ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu).

Sayang, pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak konstitusional.

□

26.

Pengamat Politik: Kepala Daerah Tidak Pro Rakyat, Jadi Kacung Pengusaha

PENGAMAT Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Uhaib As'ad menyatakan proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi sampai saat ini masih tersandera kekuatan uang.

Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya jadi pembantu atau 'kacung' para kelompok oligarki di tingkat lokal maupun nasional.

Uhaib menyatakan tak menutup kemungkinan para kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2020 ini turut memiliki karakter yang sama.

"Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung,

yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8).

Menurut Uhaib, tingginya ongkos bagi setiap kandidat untuk mengikuti pemilihan umum jadi salah satu indikasi demokrasi telah tersandera kekuatan modal.

Dengan ongkos yang tinggi, menurut dia, hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi. Demokrasi tak merembes hingga akar rumput, dimana setiap orang bisa mencalonkan diri meski tak didukung kekuatan uang.

Kondisi tersebut jadi ruang bagi kekuatan oligarki mengkooptasi demokrasi di Indonesia.

“Karena mereka punya kekuatan modal besar,” kata Uhaib.

Segelintir oligarki ini datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di ajang Pilkada. Dengan itu, praktik politik uang pun terbuka lebar.

Mereka yang memiliki uang kemudian mencoba membeli suara rakyat dengan uang-uangnya.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik lokal. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang

jadi kekuatan raksasa,” kata dia.

Ketergantungan para kandidat terhadap sumber keuangan dari segelintir oligarki berimbas pada kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan setelah terpilih.

Uhaib menyebut dengan ketergantungan itu, para kepala daerah terpilih hampir bisa dipastikan tak akan berpihak kepada rakyat. Kepala daerah itu, kata dia, pasti berpihak pada kepentingan oligarki sebagai timbal balik konsesi yang sudah dikeluarkan saat Pilkada digelar.

Ia mencontohkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Di daerah-daerah tersebut, tak sedikit kepala daerahnya memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar.

Uhaib menduga pengusaha-pengusaha itu mendapat konsesi lahan tambang karena menjadi sponsor kampanye pilkada kepala daerah tersebut.

“Mereka [kepala daerah] jadi seperti judul lagu, ‘separuh jiwaku pergi’. Ya karena mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Kondisi demikian perlahan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Status

pemerintah pelan-pelan berubah dari penguasa dan pelayan rakyat menjadi 'klien' pengusaha. Sebaliknya, para oligarki kini berstatus sebagai penguasa di daerah karena mampu mengendalikan pemerintah.

“Negara sekarang udah jadi client, bukan patron. negara tersandera kekuatan politik pemilik modal,” kata dia.[]

27.

Pengamat: Biaya Pilkada Mahal, Kepala Daerah Akhirnya Jadi Kacung Oligarki

PENGAMAT Politik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Muhammad Uhaib As'ad, menilai proses demokrasi setelah reformasi 1998 hingga saat ini sangat memprihatinkan. Ini karena proses demokrasi di Indonesia tersandera oleh kekuatan uang.

Konsekuensi dari dari proses semacam itu melahirkan kepala daerah yang hanya jadi 'kacung' para oligarki. Tidak menutup kemungkinan Pilkada 2020 kali ini memiliki karakter yang sama.

"Sebetulnya kepala daerah yang *elected* di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh *local oligarchy* atau *national*

oligarchy,” ucap Uhib dalam diskusi daring, Kamis (30/7).

Salah satu penyebab fenomena itu adalah biaya untuk mengikuti Pilkada sangat mahal. Biaya mahal itu menjadi indikasi demokrasi di Indonesia telah tersandera oleh kekuatan pemodal.

Hal itu mengakibatkan hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal cukup uang bisa ikut dalam Pilkada. Akibatnya, masyarakat kecil tidak bisa memanfaatkan haknya untuk memilih dan dipilih.

Hal itu menjadi kesempatan emas bagi para oligarki untuk memanfaatkan keadaan, sekaligus mengendalikan kepala daerah. Para oligarki akan memberikan modal kepada calon kepala daerah di ajang Pilkada.

“Pemilik modal itu bisa ga jadi calon, tapi dia mengatur irama permainan politik. Kayak pemilik kesebelasan sepak bola aja. Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” ucap Uhaib.[]

28.

Oligarki Mengancam HAM Warga Negara

KABAR Latuharhary – Praktek oligarki dalam politik di Indonesia mengancam Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Secara tidak langsung, praktek oligarki menimbulkan banyak permasalahan HAM di berbagai daerah, salah satunya akan berdampak pada pelayanan publik.

Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam *Focus Group Discussion* (FGD) bertajuk “Oligarki dalam Pelaksanaan Pilkada di Indonesia” melalui aplikasi *Zoom*, Rabu (29/07/20). Menurutnya pelayanan publik adalah upaya Negara untuk memenuhi HAM warganya, namun dengan adanya praktek oligarki maka pelayanan tersebut akan mudah terpinggirkan oleh kepentingan-kepentingan partai penguasa.

“Kalau proses politik sudah dipengaruhi secara oligarki, maka hasil kerjanya pun hanya untuk *oligarch* dan kelompok oligarkinya saja, sehingga tidak akan ramah HAM”, ucap Amiruddin.

Seperti yang kita ketahui, partai politik di Indonesia sebagian besar adalah partai keluarga dan partai yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kuasa secara finansial maupun politik. Partai yang seharusnya menyalurkan aspirasi rakyat tetapi justru sibuk mengembangkan kaki-kaki oligarkinya.

Pilkada serentak yang akan dilakukan di beberapa daerah di Indonesia pada Desember 2020 menjadi perhatian Komnas HAM. Pada lingkaran oligarki, apabila pemenang Pilkada adalah para *oligarch*, maka pemenuhan dan perlindungan HAM terancam diabaikan demi memperkuat dinasti politiknya.

Hasil dari proses politik akan berkonsekuensi kepada HAM karena Kepala Daerah terpilih tersebut yang akan mempengaruhi kebijakan di level Pemerintah Daerah. “HAM akan terancam jika oligarki masih berkembang dalam proses pemilihan kita khususnya pemilihan Kepala Daerah karena ujung tombak dalam pemenuhan HAM,” ujar Amiruddin.

Hairansyah, Komisioner Mediasi Komnas HAM sekaligus sebagai Ketua Tim Pemantauan Pemilu

Daerah 2020 hasil bentukan Paripurna hadir dalam diskusi ini. Dia mengibaratkan regulasi di Indonesia bagai buah simalakama. “Regulasi dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang notabene terdiri dari partai-partai politik”, imbuhnya.

Pernyataan menohok pun terlontar dari Dr. Muhammad Uhaib As’ad, seorang pengamat politik dan kebijakan publik dari UNISKA Banjarmasin. “Demokrasi pesta rakyat itu bohong, pesta rakyat terjadi hanya lima menit di dalam kotak suara”, ujarnya.

Uhaib berpendapat jika oligarki sangat mendominasi dalam sistem politik Indonesia, terutama dalam Pilkada. Para *oligarch* yang menjadi otak bermain di balik layar dengan mengusung para calon Kepala Daerah yang dapat diatur untuk memenuhi keinginannya. Oligarki menjadi pasar gelap karena hanya orang bermodal besar yang bisa berkontestasi di Pilkada.

“Bandar politik menjadi pengendara tanpa memperdulikan HAM masyarakat dan sekedar untuk panggung politik”, lanjut Uhaib.

Pada penghujung FGD, Amiruddin mengajak masyarakat sebagai pemilih untuk “melek politik” dan meperhitungkan HAM mereka dalam lima tahun ke depan. Pemikiran mencoblos jika ada uang harus dibuang jauh-jauh karena pilihan satu orang akan

mempengaruhi nasib ratusan juta orang lainnya. “Jika warga Indonesia mau HAM-nya terlindungi, maka jangan memilih calon-calon yang berasal dari proksi oligarki”, pungkas Amiruddin.[]

29.

Ongkos Politik Mahal, Kepala Daerah Rawan Jadi Kacung Oligarki

NEGARA saat ini tersandra oleh kekuatan pemodal. Tidak hanya itu, kepala daerah hasil Pilkada ternyata hanya menjadi kacung-kacung oligarki.

Hal itu diungkapkan, Muhammad Uhaib As'ad, pengamat Politik Universitas Islam Kalimantan (Uniska). Menurutnya, hingga saat ini proses demokrasi di Indonesia pasca reformasi masih tersandera kekuatan uang. Akibatnya, kepala daerah hasil Pilkada selama ini hanya menjadi 'kacung' oligarki di tingkat lokal maupun nasional. Bahkan bisa jadi calon-calon kepala daerah pada pilkada 2020 juga menjalankan peran yang sama.

“Sebetulnya kepala daerah yang elected di dalam Pilkada ini, sebetulnya mereka hanya wayang, kacung, yang dikendalikan oleh local oligarchy atau national oligarchy,” kata Uhaib dalam webinar yang digelar oleh Komnas HAM, Rabu (29/8/2020) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Uhaib, salah satu indikasi demokrasi tersandera kekuatan uang, ialah mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan setiap kandidat. Akibatnya substansi demokrasi tidak mencapai akar rumput. Sebab hanya orang atau lembaga dengan kekuatan modal yang besar yang bisa ikut berkompetisi dalam pilkada atau pemilu.

Kondisi tersebut memberi peluang bagi oligarki mengkooptasi demokrasi. Mereka datang memberikan modal besar bagi kandidat yang ia jagokan di pemilu maupun ajang pilkada. Kandidat yang ditopang dengan kekuatan modal kemudian membeli suara rakyat dengan uang.

Lanjut Uhaib, para pemilik modal memang tidak mencalonkan diri, namun mereka mengatur permainan politik, baik ditingkat nasional hingga ditingkat local. Ia mengibaratkan, para olikarki dalam demokrasi layaknya pemilik club sepak bola.

“Dia ga perlu jadi pemain, tapi dia beli pemain top dunia, dia bayar dan dia rancang jadi kekuatan raksasa,” ungkapnya

Menurut Uhaib, ketergantungan para kandidat oligarki akan berimbas pada produk kebijakan. Menurutnya, hampir bisa dipastikan kepala daerah yang telah duduk dipangkuan oligarki tak akan berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, mereka berpihak pada kepentingan oligarki, sebagai bentuk politik balas budi. Misalnya, memberikan konsesi lahan tambang kepada para pengusaha besar. Uhaib mengambil kesimpulan, penguasa-penguasa tambang saat ini mendapat konsesi lahan lantaran menjadi sponsor dalam pilkada maupun pemilu.

“Mereka didikte agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok yang jadi bandar dalam Pilkada,” kata dia.

Menurutnya, kondisi seperti ini sangat berbahaya. Sebab secara perlahan akan mengikis daya tawar pemerintah dan negara di hadapan para oligarki. Pemerintah perlahan-lahan pelayan rakyat menjadi ‘klien’ pengusaha. Sebaliknya, oligarki justru duduk sebagai penguasa, sebab mereka telah mampu mengendalikan pemerintah.

Seperti dilansir pinterpolitik.com, demokrasi di Indonesia akan sulit menemukan bentuk idealnya karena telah bercampur dengan politik oligarki. Pembuatan kebijakan hingga wacana politik kerap kali disesuaikan dengan kepentingan para oligark yang 'bermain' di belakang panggung.

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apa pun secara gratis” ujar Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor

Jeffrey A. Winters, Profesor di Northwestern University, dalam tulisannya, *Oligarchy and Democracy in Indonesia*, mengatakan, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam demokrasi Indonesia, khususnya setelah kejatuhan Soeharto pada 1998.

Semenjak kejatuhan Soeharto, Indonesia tidak hanya memasuki babak baru berupa Pemilu langsung, namun juga telah memasuki politik berbiaya tinggi. Menurut Winters, kekuatan materil yang dimiliki oligark menjadi kekuatan paling serbaguna. Dengan

kekuatan materiil oligark dengan mudah mengubahnya menjadi manifestasi bentuk kekuatan atau kekuasaan lainnya. Misalnya seperti menghasilkan produk hukum, mempekerjakan banyak orang, bahkan menyediakan persenjataan militer.[]

30.

Pilkada, Tanah Bumbu, dan Birahi Kekuasaan

MEMPERBINCANGKAN mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan (Kalsel), menurut saya, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) adalah salah satu kabupaten yang paling menarik di antara daerah lainnya dalam kontestasi demokrasi pada 9 Desember 2020 datang.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, khususnya industri tambang batubara dan kelapa sawit, juga memiliki sejumlah aktor politik dan aktor bisnis yang mempengaruhi peta bumi (landscape) sosio-ekonomi dan politik Kalsel.

Dalam konteks politik, misalnya, keberadaan sumber daya alam yang itu sangat terkait dengan

dinamika politik lokal. Dinamika politik lokal Tanah Bumbu sangat tergantung dan saling memengaruhi dinamika ekonomi dan bisnis dibalik para aktor politik dan aktor bisnis.

Aktor politik dan aktor bisnis terbangun dimulai pada awal pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dari Kabupaten Kota Baru. Tokoh fenomenal Zairulah Azhar (ZA) menjadi saksi sejarah dalam konteks realitas politik dan ekonomi di Tanah Bumbu saat ini.

Akselarasi politik seorang ZA tidak saja sebatas di tanah kelahirannya, Tanah Bumbu, tetapi jauh merambah ke level provinsi dan bahkan nasional. Relasinya dengan sejumlah tokoh lokal Kalsel dan Pusat (Jakarta) menjadi salah satu tokoh populer yang patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Kalsel.

Mendiskusikan mengenai sosok ZA menjadi penting untuk memahami realitas sosio-politik dan ekonomi-bisnis di Tanah Bumbu. Sebagai bupati pertama Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), di tengah teransisi kekuasaan dan konsolidasi birokrasi-organisasi itu memunculkan sejumlah orang sebagai penumpang gelap (*free rider*) atau sekelompok orang berusaha mereposisi diri masuk ke dalam jaringan struktur kekuasaan atau birokrasi.

Struktur kekuasaan-birokrasi diwarnai hubungan paternalistik dan feodalisme. Pada sisi lain, Tanbu sebagai kabupaten pemekaran telah dikelilingi para oportunistik dan loyalis semu untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis ditengah sumber daya alam yang kaya. Sumber daya alam yang kaya itu menjadi sumber kolusi dan patronase bisnis antara penguasa daerah dan pengusaha.

Relasi kuasa antara penguasa daerah dan pengusaha pada akhirnya membentuk jaringan klien bisnis (*client-business*) yang saling menguntungkan. Kehadiran klien bisnis (*client-business*) membentuk pola patron-klien (*patron-client*) sebagai kelompok strategis yang mewarnai politik lokal Tanah Bumbu.

Jaringan aktor bisnis ini mereposisi diri ke dalam jaringan struktur kekuasaan, regulasi, dan proteksi yang diberikan oleh penguasa daerah. Realitas sosio-politik dan ekonomi di Tanah Bumbu sebagai realitas empiris yang menjelaskan hubungan antara relasi aktor politik dan aktor bisnis. Menguatnya relasi antara aktor politik dan aktor bisnis karena peran strategis politik dan kekuasaan ZA.

Dalam hal ini, saya menyebut sosok ZA yang fenomenal itu sebagai orang yang paling berjasa melahirkan cikal bakal para oligarki lokal (local

oligarchy) di Tanbu. ZA adalah sumber utama patronase (the main source of patronage) politik dan ekonomi yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi dalam jagat perpolitikan lokal dan nasional.

Tentu saja klaim ini masih terbuka diperdebatkan secara akademik. Fakta ini masih bisa diperdebatkan. Klaim ini masih sebatas puzzle (irisan) kecil dalam perdebatan politik lokal Tanah Bumbu saat ini.

Tambang dan Politik Lokal Tanah Bumbu

Bagi saya, memperdebatkan dinamika politik lokal di Tanbu sangat sulit untuk memisahkan keterkaitan dengan keberadaan sumber daya alam, khususnya industri tambang batu bara. Politik dan tambang adalah realitas atau variabel yang saling memengaruhi.

Kemunculan tokoh politik dan aktor bisnis berkaitan erat dengan dunia tambang di Tanah Bumbu yang menjadi epicentrum persekongkolan politik dan bisnis. Persekongkolan antara penguasa lokal dan pebisnis ini akan menyandera demokrasi lokal.

Demokrasi lokal dalam bayang-bayang kekuatan oligarki atau kendali kelompok bisnis yang lahir di era kekuasaan ZA. Peta politik Kalsel saat ini sedang berada dalam kekuasaan Klaster Banjar Pesisir dan sebagai sebagian tokohnya ada di Tanah Bumbu. Lihat

saja sejumlah ketua partai politik besar berada dalam Klaster Banjar Pesisir. Pemetaan ini menjadi penting bila mengurai peta kekuatan politik di Kalsel.

Sejumlah aktor politik dan aktor bisnis di Tanah Bumbu memiliki pengaruh besar dalam politik lokal Kalsel. Penguasaan sumber daya politik dan bisnis serta kekuatan jaringan para local bossism atau local strongman Tanbu itu menjadi kekuatan diterminan dalam setiap kontestasi demokrasi (Pilkada Tamba) dan Pilgub Kalsel. Inilah olgarki kata Jeffery Winters, sekelompok orang atau person yang memilih kekuatan ekonomi yang mendikte kekuasaan dan membeli kekuasaan.

Demokrasi dan kekuasaan bisa takluk oleh kekuatan modal, demikian kata Professor Noreena Herzt dalam bukunya *Silent Take Over and the Death of Democracy*.

Kolusi antara politik dan bisnis di era demokrasi semakin terstruktur. Pasar politik berbiaya tinggi membuka pintu bagi pebisnis untuk berinvestasi politik atau beternak kekuasaan (*power farming*). Memahami dibalik aktor Pilkada di Tanah Bumbu tidak lebih sebagai arena beternak kekuasaan yang didesain para oligarki atau kekuatan kelompok bisnis untuk melanggengkan kekuasaan bisnis dan politik.

Para kandidat yang bertarung dalam Pilkada di Tanbu tidak lebih sebagai Dramaturgi dan pesta pora demorasi para oligarki dan elite politik. Dramaturgi itu menjadi tontonan menarik bagi rakyat dan rakyat larut dalam hingar-bingar sambil betepuk tangan di tengah ilusi demokrasi dan kerumunan politik (political crowd).

Sekali lagi, bagi saya Pilkada Tanbu sebagai Pilkada yang menarik di antara Pilkada di Kalsel. Saya katakan menarik karena aktor politik dan aktor bisnis memiliki nilai strategis dalam membaca politik lokal Kalsel yang berada dalam Klaster Banjar Pesisir

Selain itu, leading argument menjelaskan bahwa Pilkada di Tambu itu sesungguhnya yang bertarung bukan Zairullah Azhar melawan Sarifuddin H Miming. Pertarungan yang sesungguhnya adalah para jawara di balik kandidasi itu. Ini adalah pertarungan gengsi politik dan bisnis. Para Jawara ini sama-sama lahir atau paling tidak sama-sama memiliki hubungan emosional dengan ZA ketika menjadi penguasa Tanah Bumbu.

Pilkada adalah arena mengukur kekuatan amunisi politik dan politik yang pada akhirnya, meminjam istilah Mancure Olson, sebagai strategi penguasaan roving bandit stationary bandit sebagai wilayah kekuasaan politik dan politik. Tanah Bumbu adalah roving bandit

dan stationary bandit bagi aktor yang bermain di balik
Pilkada.[]

31.

Praktik Oligarki Diyakini Menguat pada Pilkada 2020

PRAKTIK oligarki dapat mencederai demokrasi dan merugikan masyarakat. Pada pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka yang punya kekuasaan dan modal besar dapat menjadi sponsor calon kepala daerah. Sehingga mereka yang terpilih dalam kontestasi cenderung mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan para elit tersebut dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Demikian hal yang mengemuka dalam webinar bertajuk “Oligarki dalam Pilkada 2020” yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, pada Rabu (29/7).

“Proses politik yang dipengaruhi oleh praktik akan menghasilkan orang yang bekerja untuk para elit (oligarkhi). Hasilnya, akan ada pengabaian HAM

masyarakat,” ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pembentukan Paripurna Pemantauan Pemilu 2020 Daerah Hairansyah mengatakan Komnas HAM menerima banyak laporan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah daerah seperti kasus konflik agraria, pengusahaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengabaian hak masyarakat adat, dan perburuhan.

Menurutnya, proses pemilihan langsung kepala daerah sangat menentukan penegakan HAM. Oleh karena itu, kepada daerah yang ada harus memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat dan kecenderungan berpihak pada penegakan HAM. Direktur Eksekutif Yayasan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi panelis dalam diskusi itu menjelaskan oligarki akan semakin subur pada pilkada 2020. Pasalnya, pada masa pandemi Covid-19, pencalonan kepala daerah makin elitis dan tertutup. Selain itu aktivitas partai dikelola jauh dari prosedur demokratis yang terbuka. “Tiba-tiba kita disodorkan calon si A, si B, ada yang berposisi masih sebagai sekretaris daerah,” imbuhnya.

Menurutnya ada sejumlah hal yang berkontribusi membuat regulasi semakin subur antara lain regulasi yang didesain untuk lebih mempermudah masuknya

oligarki seperti ambang batas pencalonan kepala daerah makin tinggi. Di sisi lain, calon syarat perseorangan semakin berat dan mahal. Lalu, adanya eksklusivitas rekrutmen, yang mana pengambilan keputusan untuk pencalonan kepala daerah ditentukan oleh segelintir orang di partai politik, dan penegakan hukum pilkada yang lemah. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor, pada kesempatan yang sama mengatakan biaya politik yang mahal untuk menjadi calon kepala daerah antara lain biaya dukungan dari partai atau beli perahu, konsolidasi, dan kemenangan. "Tidak heran menjadi bupati dan wali kota membutuhkan Rp20-30 miliar," ucapnya. Selain itu, politik uang seperti vote buying (jual-beli) suara, serangan fajar, termasuk mengebom satu wilayah dengan kekuatan uang juga kerap terjadi saat pilkada. Sehingga, modus praktik oligarki terjadi di hampir semua proses politik. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik UNISKA Banjarmasin, Kalimantan Selatan Muhammad Uhaib As'ad, pada kesempatan itu menyampaikan praktik oligarki terjadi di banyak wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kalimantan. Ia mengungkapkan pengusaha yang punya kepentingan atas sumber daya alam atau izin usaha tambang dan konsesi perkebunan, menjadi sponsor dalam kontestasi politik lokal. Uang, tuturnya, sangat dominan dalam proses demokrasi.

Adapun kepala daerah yang terpilih dari modal politik para elit oligarki, mengembalikan uang tersebut."Maka terjadi perselingkungan antara pengusaha dan kepala daerah. Baru-baru ini Bupati Kutai, Kalimantan Timur, terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada proses transaksional sebelum pilkada sehingga sumber daya alam menjadi jaminan," tukasnya.[]

32.

Ketika Daulat Demokrasi Runtuh

MITOS kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat masih sebatas ilusi seperti tercantum dalam konstitusi negara. Konstitusi negara secara tegas menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan negara.

Salah satu tujuan negara dihadirkan adalah membangun kedaulatan dalam semua aspek kehidupan. Antara lain adalah kedaluat dalam bidang sosial ekonomi dan politik serta penegakan nila-nilai demokrasi bermartabat bagi seleuruh rakyat.

Indonesia memilih jalan demokrasi sebagai jalan sistem pemerintahan, yaitu sistem yang menempatkan kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Oleh karena itu desain kebijakan negara harus merefleksikan

kepentingan dan membela kepentingan rakyat bukan menguntungkan sekelompok orang atau orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan saja.

Seiring perkembangan demokrasi saat, daulat rakyat telah tereduksi menjadi daulat sekelompok orang atau kelompok kepentingan. Kekuatan sekelompok orang itulah yang menjadi sumber persoalan dimana negara telah menjadi sandera oleh kepentingan para oligarki itu.

Saya ingin menyebut sekelompok orang sebagai kelompok oligarki-predatoris yang memiliki kekuasaan ekonomi. Para oligarki-predatoris ini bukan saja berusaha menguasai ekonomi negara tetapi juga mendikte dan menguasai kekuasaan politik.

Institusi negara telah tersandera oleh kuasa oligarki-predator. Desain kebijakan dan regulasi negara dalam bayang-bayang pusaran kepentingan para oligarki-predator itu. Negara semakin tidak berdaya melawan kekuatan modal.

Mengapa? Desain kekuasaan politik pemerintahan Orde Baru telah dikuasai oleh para oligarki-predatoris yang berdampak pada political landscape (Vedi R Hadiz, 2004, dan 2011).

Political landscape semakin jelas, yaitu menguntungkan kaum modal secara ekonomi dan politik.

Desain ekonomi dan politik yang dijalankan negara di tengah isu demokratisasi, kebebasan, dan keterbukaan telah merobohkan rumah demokrasi itu sendiri. Yaitu demokrasi dimana kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat.

Pemaknaan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat seperti yang diimajinasikan oleh Abraham Lincoln (salah satu Presiden Amerika), bagi negeri hanya batas ilusi dan mimpi. Pemaknaan kedaulatan tertinggi ditangan rakyat seperti diucapkan para pemikir Romawi Kuno 600 tahun lalu sebelum Masehi itu, sebatas ilusi bagi negeri ini.

Kata-kata indah: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat hanya barlaku bagi negara polis 600 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus di negara Athena.

Perkembangan demokrasi modern seperti halnya di Indonesia, kedaulatan rakyat atau daulat rakyat telah digantikan oleh daulat oligarki-predator, yaitu dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Ya, di negeri ini rumah demokrasi telah runtuh menjadi demokrasi oligarki-predator, demokrasi predator, demokrasi para perampok ekonomi negara.

Soal rampok merampok ini buku Professor Jeffery Winters secara detail dan gamblang dideskripsikan dalam *Democracy and Oligarchy in*

Indonesia, 2004 dan Oligarkcy, 2011.

Perkembangan situasi mutakhir di negeri ini munculnya kekerasan politik dan politik sesungguhnya sebagai dampak dari kondisi ekonomi dan politik negara yang semakin memprihatinkan terpuruk.

Ketika rakyat berjuang bertahan untuk hidup, negara dengan instrumen kekuasaan justru tampil sebagai monster dan memangsa anak kandung sendiri (Muhammad Uhaib As'ad, *Demokrasi dan Predator Nagara*, 2020) sekadar membela kepentingan para kapitalis.

Negara tampil sebagai pemangsa bagi rakyatnya sendiri dan tampil dengan wajah sangar ala Orde Baru. Wajah sangar itu bisa kita lihat soal kebijakan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dan Undang-Undang Cipta Karya yang hanya mengutamakan para kapitalis dan investor asing.

Kedua undang-undang, regulasi, dan kebijakan negara itu sebagai bentuk penelanjangan kedaulatan rakyat dan pengkhianatan institusi negara (eksekutif dan legislatif) terhadap rakyat demi kepentingan kapitalis. Lahirnya revisi Minerba dan undang-undang Cipta Karya itu bila dilihat perspektif studi ekonomi politik bukan dari ruang hampa kepentingan.

Bagi penguasa negara tentu saja memiliki pilihan rasional politik (*rational choice*). Yaitu suatu pilihan rasional sudah pasti atas nama kepentingan negara dan rakyat. Atas nama kepentingan negara dan rakyat itu menjadi instrumen justifikasi legal di tengah gemuruh resistenai rakyat, khusus kaum buruh pekerja.

Bagaimana penguasa mengatasnamakan kepentingan rakyat sementara rakyat melakukan penolakan dimana mana terhadap kebijakan negara yang predatoris itu.

Pada sisi lain, para kaum kapitalis alis pemilik modal, oligarki-predator, dan investor asing berpesta pora tengah gemuruh suara kaum buruh melakukan resistensi dimana-mana. Tetesan keringat, air mata manjadi saksi sejarah dari kekerasan politik dan kekerasan ekonomi dari modal kekuasaan yang berlabel demokrasi. Ini adalah politik kekuasaan politik belah bambu dimana.

Negara tampil sebagai jongos dan menjadi bagi kepentingan kesearakahan kooperasi atau kaum borjuis. Negara telah menjadi kacungan dalam sudah jauh terperangkap ke dalam kubangan para oligarki-predators.

Negara tampil bagikan monster dan hantu bagi rakyatnya sendiri. Inilah risiko sebuah negara bila ter-

sandera atau dibajak oleh kekuatan pasar. Para wakil rakyat yang ada di Senayan dan partai politik telah menjadi bagian dari pasar. Karena bagian dari pasar tentu saja membela kepentingan pasar dalam bungkus kepentingan rakyat dan negara.

Revisi Undang-Undang Menirba dan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai modus pesekongkolan antara aktor politik dan ektor pasar yang paling telanjang dan memuakkan setelah kejatuhan pemerintahan Orde Baru.

Inilah ilus dan paradoks demokrasi yang paling serius dalam sejarah demokrasi setelah pemerintahan Orde Baru. Fakta ini semakin menguatkan arumentasi Professor Tom Pipensky bahwa demokrasi Indonesia menjalan mundur (*Backsliding of Democracy*). Inilah wajah transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang belum menemukan format jelas bagai bagaimana membangun demomrasi substantif.

Alih-alih membangun demokrasi substantif justru semakin menguatnya demokrasi oligarki-predator dan demokrasi politik famili (*political family*). Bisa jadi, Pilkada Serentak pada Desember 2020 datang sekedar membabtis calon pemimpin berwatak oligarki-predatoris apalagi calon penguasa daerah didanai para mafia atau para cukong Pilkada.

Di saat rakyat bertarung bertahan hidup dalam situasi ekonomi yang parah akibat Covid-19 justru energi politik anak bangsa ini habis terkuras merespon soal-soal kebijakan negara yang tidak populer itu ketimbang menangi kasus Covid-19.

Rakyat semakin di dera keputusan. Putus asa secara ekonomi dan politik. Rakyat merasa terkianati terutama bagi kalangan rakyat. Penguasa sibuk dengan pidato-pidato, pernyataan-pernyataan yang justru semakin menambah kenyinyiran rakyat. Semestinya pemerintah fokus menangan kasus Covid-19 bukan sibuk memaksakan dan mensahkan undang-undang yang tidak populer di mata namun populer di mata korporasi atau pasar.

Sekali lagi, kedaulatan sudah runtuh. Rumah demokrasi tinggal puing-puing berserakan. Demokrasi dan kebijakan negara telah dibajak oleh kekuatan pasar. Pasar telah negara dalam negara. Institusi demokrasi telah menjadi bagian dari pasar. Ya, pasar telah menjadi hegemoni dan mendominasi peradaban politik dan kebudayaan manusia.

Manusia telah dikendalikan oleh kekuatan pasar termasuk pasar politik. Ya, semua serba pasar. Pilkada pun menjadi kerumunan pasar yang diagungkan. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat sekedar

nyanyian sunyi dan menghibur hati disaat kesepian di tengah gemuruh pasar politik, pasar Pilkada.

Pasar Agung saat ini adalah: dari korporasi, oleh korporasi, dan oleh korporasi. Tidak lagi lagu demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nyanyian sudah terkubur dan sudah menjadi tulang belulang dalam terukir dalam nisan sejarah demokrasi negari ini.[]

33.

Pilkada dan Pambusukan Politik

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) tidak tidak tertutup kemungkinan sekadar menjadi arena pambusukan politik. Pambusukan politik ini sebagai dampak dari Piilkasa yang bercorak pasar gelap.

Sekali lagi, model demokrasi pasar gelap dan biaya tinggi ini memberikan kesempatan bagi para cukong menjadi penumpang yang mengendalikan Pilkada. Apa yang bisa diharap bagi rakyat dari model Pilkada atau pesta demokrasi seperti ini?

Adalah Ratnia Salihah (2016) dalam tulisannya, Pola Relasi dan Politik di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent-Seeing. Ratnia Salihah pun secara umum menjelaskan bahwa, para calon kepala daerah yang dibandari para cukong akan sulit menghindari perilaku berburu rente ekonomi untuk membayar upeti politik

pada cukong.

Kekuasaan jabatan akan dipertaruhkan. Yaitu mempertaruhkan jabatan untuk memperdagangkan pengaruh (*trading power influence*). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Ali Azhar (2016) dalam tulisannya, Fenomena Rent-Seeking Pengusaha-Penguasa. Penguasa yang di dari para cukong secara otomatis akan tersandera dan cukong-cokong itu menjadi majikan (*patron*) penguasa daerah.

Pilkada selamanya akan menjadi busuk (*decay*), ketika institusi demokrasi (partai politik, KPU, Bawaslu, dan instrumen demokrasi ikut terlibat proses pembusukan politik karena kuatnya intervensi colong dan mendikte melalui kuasa uang.

Dalam banyak kasus Pilkada keterlibatan aparat penyelenggara Pilkada masih saja terjadi. Oleh karena itu, mari kita komitmen bersama bahwa Pilkada adalah arena suci untuk membaptis penguasa daerah dan rakyat pun tidak terjebak politik pragmatisme yang akan menyengsarakan dalam jangka panjang.

Literasi politik harus digalakkan bagi rakyat sehingga rakyat tidak melihat Pilkada sekedar rutinitas yang kehilangan makna substantif. Atau Pilkada tidak lebih pesta poranya para cukong atau elite politik yang melelahkan dan membosankan.[]